

**EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA NGABAR PONOROGO**

TESIS



Oleh:

ASIS SUSTIAWAN
NIM 501200001

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2022

**EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA NGABAR PONOROGO**

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah



Oleh:

ASIS SUSTIAWAN
NIM 501200001

**PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Asis Sustiawan, NIM 501200001, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 07 Maret 2022

Pembuat Pernyataan



Asis Sustiawan
NIM 501200001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asis Sustiawan
NIM : 501200001
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Efektifitas Program SDGs Desa
terhadap Kesejahteraan Masyarakat di
Desa Ngabar Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2022

Penulis



Asis Sustiawan

viii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Asis Sustiawan, NIM 501200001 dengan judul: *"Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo"*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 07 Maret 2022

Pembimbing



Dr. Luhur Prasetyo, S.E., M.E.I.
NIP. 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK BAN-PT/Ak-SUBV/PT/CI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461803
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Asis Sustiwawan, NIM 501200001, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo"*, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Ketua Sidang		
2.	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP. 196906241998031002 Penguji Utama		
3.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I. NIP. 197801122006041002 Anggota Penguji		

Ponorogo, Mei 2022
Direktur Pascasarjana,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah*, peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Sebab, hanya dengan karunia ilmu, rahmat, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: ***“Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo”*** sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar magister (S2) Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kemudian melahirkan sebuah peradaban baru, peradaban yang menjunjung tinggi norma-norma agama yaitu peradaban Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang andil dalam penulisan tesis ini, di antaranya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
2. Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

3. Bapak Izza Hanifuddin, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Bapak, Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I. selaku pembimbing.
5. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Gus Menteri Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd serta teman Pendamping TPP P3MD Kabupaten Madiun
6. Istri tercinta yang ku sayangi Duwi Habsari Mutamimah dan putraku AZ-Zayq AL-Devan Sustiawan, terimakasih atas bantuan, dukunganya dan kasih sayangnya tetap tercurahkan pada untukku, umur panjang yang berkah, serta kesempatan untuk naik haji.
7. Kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku, telah memberi semangat dan masukan demi selesainya tesis ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, rahmat, kebahagiaan dunia dan di akhirat.
8. Semua pihak yang telah membantu dan segenap civitas akademika seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo yang telah membimbing Peneliti termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tesis ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan khususnya kepada Penulis. Semoga Allah Swt. meridhoi atas setiap langkah kita, Aamiin.

Ponorogo, 07 Maret 2022

Asis Sustiawan
NIM 501200001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asis Sustiawan
NIM : 501200001
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Efektifitas Program SDGs Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2022

Penulis

Asis Sustiawan

EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NGABAR PONOROGO

ABSTRAK

Dengan adanya program SDGs Desa di Indonesia, SDGs Desa secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Prioritas pembangunan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2021 fokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut dengan SDGs Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Analisis data dengan metode deskriptif dan induktif.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 2) Menganalisis efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 3) Menganalisis dampak program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan baik sesuai dengan prioritas penggunaan. Kedua, berdasarkan efektivitas pelaksanaan program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat cukup efektif dilihat dari tiga pendekatan pengukuran tingkat efektivitas, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Ketiga, Dampak efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan telah memberikan dampak yang positif, warga masyarakat sudah menikmati dan merasakan hasil dari program SDGs Desa yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NGABAR PONOROGO

ABSTRACT

With the Village SDGs program in Indonesia, the Village SDGs explicitly aim to eradicate poverty and hunger for prosperity and prosperity. The development priorities of the Ministry of Village for Development of Disadvantaged Regions in 2021 focus on Sustainable Development Goals (SDGs) or known as Village SDGs.

This study uses a qualitative approach. Data was collected through observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis with descriptive and inductive methods.

This study aims to: 1) Analyze the implementation of the Village SDGs on community welfare. 2) Analyzing the effectiveness of the Village SDGs program on community welfare. 3) Analyzing the impact of the Village SDGs program on community welfare.

Based on the process of data collection and analysis, this study resulted in three findings. First, the implementation of the Village SDGs program for the welfare of the community is carried out properly in accordance with the priority of use. Second, based on the effectiveness of the implementation of the Village SDGs program on community welfare, it is quite effective in terms of three approaches to measuring the level of effectiveness, namely the source approach, process approach and target approach. Third, the impact of the effectiveness of the Village SDGs program on welfare has had a positive impact, community members have enjoyed and felt the results of the Village SDGs program which are very beneficial for the welfare of the community.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II SDGs DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....

.....	23
A. Efektivitas.....	23
1. Pengertian Efektivitas.....	23
2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas.....	26
B. SDGs Desa.....	31
1. Sejarah SDGs.....	32
2. Pengertian SDGs Desa.....	38
3. Dasar Hukum SDGs Desa.....	39
4. Tujuan Program SDGs Desa.....	40
5. Arah Dan Pokok-Pokok Program Kebijakan SDGs Desa.....	41
6. Indikator SDGs Desa.....	42
7. Prioritas SDGs Desa.....	43
8. Pengelolaan Keuangan Desa	45
C. Kesejahteraan Masyarakat	49
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	49
2. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.....	51
3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	52

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	55
5. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat.....	60
6. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat.....	62
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	64
BAB III SDGs DESA DI DESA NGABAR	67
A. Gambaran Umum Ekonomi Masyarakat Desa Ngabar..... 67
1. Topografi Desa.....	67
2. Demografi Desa	68
3. Data Kemiskinan Penduduk Desa	73
B. Pelaksanaan Program SDGs Desa di Ngabar	75
C. Efektivitas Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	92
D. Dampak Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	103
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NGABAR	111
A. Analisis Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	111
B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program SDGs Desa	

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	118
C. Analisis Dampak EfektivitasPelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	122
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga	71
2.	Berdasar pada kelompok usia	71
3.	Berdasarkan pada tingkatan kesejahteraan	72
4.	Berdasarkan pekerjaan	73
5.	Tingkat kesejahteraan	74
6.	Jumlah penduduk miskin	75
7.	Realisasi program dalam upaya kesejahteraan masyarakat	95
8.	Berdasarkan tingkat kesejahteraan	108
9.	Daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat	107
10.	Berdasarkan tingkat kesejahteraan tahun 2020 dan tahun 2021	125

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Sistem Transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini adalah sistem *Institute of Islamic Studies*, McGill University sebagai berikut:

ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Th
ج	=	J
ح	=	ḥ
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	dh
ر	=	R

ز	=	Z
س	=	S
ش	=	sh
ص	=	ṣ
ض	=	ḍ
ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ
ع	=	'
غ	=	gh
ف	=	f

ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	H
ه	=	W
ي	=	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) digunakan tanda (̣ atau ^) di atas vokal ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup ganda atau diftong ditransliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘alayhim, qawl, mauḍū’ah

4. Kata-kata yang ditransliterasi dan kata dari bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku bahasa Indonesia harus dicetak miring, kecuali untuk nama orang atau lembaga.
5. Bunyi hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf kosonan akhir.

Contoh:

Inn al-dīn bukan *inna al-dīna*, *‘inda Allāh* *‘inda Allāhi*

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’t*) dan *iḍāfah*

ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *muḍāf* dengan “at”.

Contoh:

Sunnah sayyi'ah ḍawābiṭ al-qirā'ah

7. Kata yang berakhir dengan *ya'musyaddadah* (ber-*tashfīd*) ditransliterasikan dengan *ī*, jika *ī* ditransliterasikan dengan *tā'* marbūṭah, transliterasinya adalah *īyah*, jika berada di tengah *ya'musyaddadah* ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazāli, al-Nawāwī

Ibn Taymīyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah

Sayyid, muayyid, muqayyad

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan dunia yang tidak pernah hilang. Dunia menanggapi persoalan ini dengan pertemuan dan melahirkan deklarasi. Deklarasi tersebut yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDGs) pada September 2000 diikuti oleh 189 Negara.¹Target utama dalam pertemuan itu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di dunia.² Deklarasi yang mencetuskan MDGs bahwa kemiskinan menjadi tanggungjawab semua negara yang ada di dunia. MDGs merupakan cikal bakal dari dasar pembangunan Internasional yaitu SDGs.³ Dua tahun setelah pembangunan Internasional Berbasis SDGs, pada tahun 2017 Indonesia mengadopsi pembangunan Nasional Berbasis SDGs dan pada tahun 2020 Kementerian Desa lewat Permendes Nomor 13

¹ Adisasmita, Raharjo, "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", (Yogyakarta, 2011: Graha Ilmu)

² Ibid.

³ Ibid.

Tahun 2000 menggunakan SDGs Desa sebagai dasar pembangunan terfokus dan berkelanjutan di desa.⁴ Dasar pembangunan terarah pada SDGs, dengan harapan desa mampu memperoleh manfaat yang maksimal pembangunan terarah dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan desa.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi negara-negara di dunia, mendukung penuh SDGs (*Sustainable Development Goals*) *no poverty* (tanpa kemiskinan).⁶ Semua negara mengakui bahwa SDGs merupakan produk Perserikatan Bangsa Bangsa yang bisa menjawab persoalan tentang dunia dalam pembangunan dan kehidupan. SDGs sebagai dasar kerja negara sesuai Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 59 Tahun 2017 sebagai arah dan tujuan pembangunan.⁷ Desa tanpa kelaparan dan desa tanpa

⁴ Roberta Zulphi Surya, “Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Desa Seresam di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu” ISSN: 2620-3332, *Jurnal Bapeda SDGs Center*, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 79 Selodang Mayang (2019): 79.

⁵ Ibid.

⁶ Mochamad Dzaki Ansori, “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah ahasiswa*, : 10.

⁷<http://harapan.sideka.id/sdgs-des/>, [31 Januari 2020], diakses pada pukul 20.19 WIB.

kemiskinan merupakan tujuan utama Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁸ Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam SDGs dan ini merupakan tanggungjawab dari semua negara untuk secepat mungkin diselesaikan sebagai rasa kemanusiaan.⁹ Kemiskinan merupakan masalah serius dunia yang harus secepat mungkin untuk ditekan khususnya negara berkembang.¹⁰

Permendes nomor 13 tahun 2020 dasar utama pembangunan desa untuk kesejahteraan maupun pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan.¹¹ Setiap penggunaan pembangunan diwajibkan SDGs Desa sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan

⁸<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3359/gus-menteri-desa-tanpa-kemiskinan-dan-desa-tanpa-kelaparan-adalah-target-kita>, [4 Januari 2020], diakses pada pukul 08.17 WIB.

⁹<https://news.detik.com/kolom/d-4313874/sdgs-dan-upaya-penurunan-kemiskinan-di-indonesia>, [4 Januari 2020], diakses pada pukul 09.04 WIB.

¹⁰ Ibid.

¹¹<https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-desa-2/>, [4 Januari 2020], diakses pada pukul 09.34 WIB.

kemiskinan dan kelaparan serta pada kesejahteraan kehidupan masyarakat.¹²

Pembangunan ekonomi atau ketahanan pangan merupakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang harus dikerjakan pada pemerintah dan arah kebijakan.¹³ Sesuai arahan dan tujuan Menteri Desa bahwa arah pembangunan desa mampu mendukung pembangunan nasional.¹⁴ SDGs Desa merupakan arah Tujuan Pembangunan Nasional dan diundangkan lewat Perpres No 59 Tahun 2017 dengan sistem berkelanjutan.¹⁵ Pembangunan terarah serta terfokus dengan harapan memberikan manfaat yang maksimal sesuai kondisi desa. Semua ini diharapkan bahwa pemerintah mudah dalam pengawasan pembangunan serta memberikan

¹²[http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/68-SDGs-Desa-Pengertian--Tujuan-dan-Sasaran#:~:text=Jika%20mengutip%20dari%20situs%20undp,mempromosikan%20pertanian%20berkelanjutan%20\(Zero%20Hunger\),](http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/68-SDGs-Desa-Pengertian--Tujuan-dan-Sasaran#:~:text=Jika%20mengutip%20dari%20situs%20undp,mempromosikan%20pertanian%20berkelanjutan%20(Zero%20Hunger),) (4 Januari 2020), diakses pada pukul 09.20 WIB.

¹³<http://sdgsindonesia.or.id/>, [4 Januari 2020], diakses pada pukul 10.06 WIB

¹⁴<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3548/gus-menteri-rilis-metodologi-pengukuran-sdgs-des>, [5 Januari 2020], diakses pada pukul 10.20 WIB

¹⁵ Ibid.

intervensi pembangunan.¹⁶Oleh karena itulah SDGs Desa mampu sebagai dasar pembangunan prioritas tahun 2021.¹⁷

SDGs secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.¹⁸ SDGs mampu menekan angka kemiskinan dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim.¹⁹ Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia terkhusus bagi negara yang berkembang.²⁰ Baik dari sekarang atau pada generasi yang akan datang tanpa dengan mengeksploitasi kapasitas sumberdaya alam yang ada

¹⁶ Totok Yulianto, *“Pedoman Proses Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”* (Jakarta Selatan : Indonesia Untuk Kemanusiaan, 2019), 52.

¹⁷ Ibid.

¹⁸[http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/#:~:text=SDGs%20secara%20eksplisit%20bertujuan%20memberantas,urgen%20untuk%20mengatasi%20perubahan%20iklim.&text=SDG%20terdiri%20atas%2017%20tujuan,pembangunan%20berkelanjutan%20\(Gambar%202\).](http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/#:~:text=SDGs%20secara%20eksplisit%20bertujuan%20memberantas,urgen%20untuk%20mengatasi%20perubahan%20iklim.&text=SDG%20terdiri%20atas%2017%20tujuan,pembangunan%20berkelanjutan%20(Gambar%202).), [5 Januari 2020], diakses pada pukul 09.15 WIB

¹⁹ Djonet Santosa, ”Panduan Bagi Masyarakat Sipil Dalam Monitoring Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Di Daerah” (Jakarta Selatan : Infid,2019), 34.

²⁰ Ibid.

di dunia.²¹ Parlemen, Pemda dan Pemerintah sebagai penanggungjawab utama melaksanakan SDGs baik ditingkat nasional maupun global. Pemerintah merupakan penggerak utama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi/review SDGs.²² Tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan adalah tujuan akhir pembangunan dalam kesejahteraan program SDGs Desa.²³ Untuk mencapai tujuan tersebut, layanan dasar serta akses sumber daya produktif harus menjadi prioritas utama dalam keseharian.²⁴ Penyediaan pangan melalui ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyediakan pangan.²⁵ Penyediaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan merupakan hal yang tidak terpisahkan sebagai

²¹ Gellwynn Jusuf, “*Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*” (Jakarta Selatan : Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas, 2017), 64.

²² Ibid.

²³ Armida Salsiah Alisjahbana, “*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*”, (Bandung : Unpad Press, 2018), cet. 2, 252

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

penopang sewasembada pangan dunia.²⁶ Dengan pembukaan lahan pertanian semua negara diharapkan mampu untuk menekan kemiskinan mencegah kelaparan dan mencapai tujuan dari SDGs.²⁷

Peran serta tanggungjawab besar yang diterima desa dalam program SDGs Desa maka pemerintah desa harus memiliki prinsip akuntabilitas dalam perencanaan pelaksanaan tatusaha pelaporan pertanggungjawaban baik kepada negara ataupun masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Mendasarkan diri pada A Halim Iskandar menyatakan:

Hikmah terbesar pandemi global Covid-19 ialah *greatreset*. Dormansi hampir seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan politik membuka waktu guna berefleksi. Hanya yang telah bersiap diri, kelak pascapandemi, berlari lebih kencang daripada lainnya. Selama dormansi inilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Desa memperoleh relevansinya, yaitu menyiapkan pembangunan desa secara total: pematangan konsep, dukungan kebijakan dan kelembagaan, serta pendataan

²⁶ Michael Hoelman, “Panduan SDGS Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemengku Kepentingan Daerah”, (Jakarta selatan : Infid, 2015), 55.

²⁷ Ibid.

detail dari dalam desa. Desa berkesempatan mengatasi ketertinggalan karena SDGs Desa wajib menjangkau semua warga (*no one left behind*), segenap lingkungan desa, serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat.²⁸

Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pembangunan nasional berkelanjutan di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 terfokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut dengan SDGs Desa.²⁹ Penggunaan Prioritas Dana Desa merupakan sebagai amanat dari Undang-Undang Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰ Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berkelanjutan dengan

²⁸ Abdul Halim Iskandar, “*hikmah terbesar pandemi global covid 19*” <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id>, (5 januari 2021), diakses pada pukul 21.00 WIB.

²⁹ Abdul Halim Iskandar., *Inilah Prioritas Penggunaan dana Desa 2021*, <https://setkab.go.id/inilahh-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021/>, [31 Januari 2020], diakses pada pukul 20.53 WIB.

³⁰ Abdul Halim Iskandar, “*Peraturan Menteri Desa no. 13 tahun 2020*” <http://sdgsdesa.kemendesa.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf>, [31 Januari 2020], diakses pada pukul 20.34 WIB.

ketahanan pangan.³¹ Dengan memaksimalkan tujuan peningkatan kesejahteraan maupun rasa aman tenteram dalam kehidupan.³²

Kemiskinan menurut BPS sebagai ketidakmampuan manusia dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Penduduk di dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.³³ Jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah rata-rata per kapita per bulan (di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Ponorogo bulan Maret 2019 yaitu 83,97 ribu jiwa dan jumlah ini berkurang 6,25 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 90,22 ribu jiwa.³⁴ Data persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, 2018 sebanyak 10,36 % dan 2019

³¹ Desy Mediana Handayani, “Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa*, Universitas Brawijaya Malang (2019): 2.

³² Ibid.

³³ [https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2020/03/17/19/profil-kemiskinankabupaten-ponorogomaret2019.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20\(penduduk%20dengan,sebesar%2090%2C22%20ribu%20jiwa.,](https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2020/03/17/19/profil-kemiskinankabupaten-ponorogomaret2019.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20(penduduk%20dengan,sebesar%2090%2C22%20ribu%20jiwa.,) [4 Januari 2020], diakses pada pukul 10.20 WIB

³⁴ Ibid.

sebanyak 9,64%.³⁵ Sejak Tahun 2015-2019 jumlah penduduk maupun prosentasi kemiskinan mengalami penurunan di Kabupaten Ponorogo.³⁶ Menurut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah) 2016-2021 bahwa angka kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin.³⁷ Pemerintah Ponorogo setiap tahun berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan selama lima tahun terakhir. Penurunan pada angka kemiskinan tahun 2019 0,72% dari semula tahun 2018 10,36% menjadi 9,64% tahun 2019.³⁸

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terletak di selatan pusat pemerintahan Ponorogo Status Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 Maju dan pada tahun 2021 sudah menjadi setatus Mandiri. Penduduk 2.586 jiwa, laki laki 1.246 dan perempuan 1.340 jiwa. Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah desa berupaya keras untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ <https://ponorogo.go.id/2020/02/05/angka-kemiskinan-di-ponorogo-ditarget-turun-03-persen/>, [4 Januari 2020], diakses pada pukul 10.30 WIB

³⁸ Ibid.

pelatihan-pelatihan yang terukur berbasis skil, memberikan lapangan kerja pada Padat Karya Tunai Desa yaitu pembangunan desa, memaksimalkan bantuandari BLT DD 60 KK, bantuan Kementerian Sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 192 KK, bantuan dari Kementerian Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)103 KK, bantuan yang bersifat tidak mengikat dari Rumah Zakat 103 KK dan bantuan Donatur terdapat 3 KK untuk didistribusikan kepada masyarakat sesuai kriteria.

Fokus utama terhadap penelitian ini adalah efektivitas program SDGs Desa. Efektifitasterhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo dan terutama dalam ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa pembangunan melalui Kementerian Desa menggunakan program SDGs Desa yaitu pembangunan yang terfokus dan berkelanjutan.Efektivitas merupakan hal sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program dalam memeberikan

manfaat dari tujuannya.³⁹ Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program dapat dilihat serta diamati dari manfaatnya, hal ini seperti pendapat dari Martini dan Lubis. Pengukuran efektifitas bahwa keberhasilan suatu program dilihat dari manfaat (output) dengan sistem pendekatan pada sasaran (*goals approach*).⁴⁰ Pengukuran efektivitas program SDGs Desa diukur melalui *output* yang dihasilkan apakah hal tersebut dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Desa Ngabar tersebut.

Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut bahwa Penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta membahas permasalahan pada program SDGs Desa menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul “*EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NGABAR PONOROGO*”.

B. Rumusan Masalah

³⁹ Hari Lubis dan Martani Husaini, “*Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*”, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), 55.

⁴⁰ Ibid..

Berdasarkan terhadap batasan masalah, maka Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar?
3. Bagaimana dampak program SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar.
2. Untuk menganalisis efektivitas dalam program SDGs Desa di Desa Ngabar.
3. Untuk menganalisis dampak program SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diharapkan hasil penelitian mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan pemikiran maupun sumbangan dalam pengembangan program SDGs Desa, terutama dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangannya serta dampak program SDGs Desa. Mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan terhadap efektifitas program SDGs Desa terhadap masyarakat Desa Ngabar.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dengan harapan mampu untuk menambah pengetahuan bagi adik-adik angkatan IAIN Ponorogo. Serta mampu memberikan manfaat kontribusi lebih bagi pihak terkaet dari hasil penelitian. Sebagai sumbangan studi untuk menentukan kebijakan rencana pembangunan terfokus, terarah dan berkelanjutan. Bahan evaluasi pembangunan perencanaan desa sampai pada tahap pelaporan.

E. Kajian Terdahulu

Pelaksanaan efektifitas program pembangunan desa menggunakan SDGS Desa belum ada yang

membahas sebelumnya. Program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo merupakan yang pertama kali untuk diadakan penelitian. Tetapi terdapat beberapa peneliti yang meneliti terkait program Dana Desayang mengarah pada pemberdayaan dan belum meneliti tentang program SDGs Desa diantaranya adalah karya dari Iwan Ridhwani, seorang peneliti dari IAIN Ponorogo yang diteliti pada tahun 2020 "*Efektifitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*"⁴¹ Kesimpulan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan program Dana Desa. Program Dana Desadi Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan pada undang-undang sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Kedua, berdasar pada penelitian bahwa efektivitas diukur dengan tiga pendekatan diantaranya menggunakan pendekatan *resource approach* (pendekatan sumber), menggunakan pendekatan *process approach* (pendekatan proses) dan

⁴¹ Iwan Ridhwani, "*Efektifitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*", (Tesis, Pascasarjana Iain Ponorogo, 2020)

menggunakan *goals approach* (pendekatan sasaran). Pelaksanaan penggunaan program Dana Desa di Desa Ngabar terlaksana dengan efektif dan akuntabel. Ketiga, dampak dari program Dana Desa di Desa Ngabar Ponorogo terlaksana dengan baik serta memberikan dan menumbuhkan masyarakat yang berdaya dan mandiri untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan diri sendiri dan keluarga.

Selanjutnya karya ilmiah/tulisan Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Fakultas Ilmu Politik) yang ditulis pada tahun 2016 berjudul "*Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*" karya dari.⁴² Berkesimpulan bahwa realisasi program Dana Desa tersebut sesuai peraturan undang-undang sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat serta memberikan dampak masyarakat yang peduli dengan kreatifitas ekonomi lokal skala desa. Inisiatif maupun

⁴²Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama "*Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*", (Karya Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

dorongan dari pemerintah sangat diperlukan demi terwujudnya masyarakat sejahtera, mandiri serta mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pada beberapa pustaka di atas bahwa realisasi penggunaan program Dana Desa tersebut sudah efektif. Dilihat dari sudut pandang pembangunan, pemberdayaan, pengembangan terhadap ekonomi lokal masyarakat. Namun fokus pada penelitian ini Penulis ingin meneliti program baru yaitu SDGs Desa yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada penelitian tidak hanya fokus terhadap *output* (hasil). Penulis akan meneliti terhadap proses yang akan di laksanakan, sehingga akan mengetahui hasil yang maksimal dari perencanaan sampa pada pelaksanaan pertanggungjawaban. Apalagi dengan adanya masalah terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desaseperti yang sudah disampaikan di atas, perlu dilakukan kajian pelaksanaan penggunaan program secara mendalam.

F. Metodologi Pada Penelitian

1. Metode dan Jenis Pendekatan

Pada penelitian Peneliti melaksanakan dengan pendekatan disiplin ilmu pada ekonomi syari'ah. Penelitian kualitatif, dengan karakteristik alami (*natural setting*) dengan sumber data secara langsung, deskriptif serta lebih mengutamakan proses dari pada hasil yang dicapai.⁴³ Untuk analisa lebih dilaksanakan secara analisa induktif dalam penelitian kualitatif.⁴⁴

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian dilaksanakan dengan pengamatan serta harus terlibat peran aktif dalam penggalian data primer karena peran dari Peneliti akan menentukan hasil dari penelitian tersebut.⁴⁵ Penelitian sangat dibutuhkan peran aktif dari seorang Peneliti, karena sebagai kunci utama dalam penggalian data maupun pengumpulan data.

Penelitian melaksanakan studi lapangan mulai dari pendahuluan. Hasil dari penelitian di lapangan diseminarkan pada forum untuk

⁴³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

mendapatkan masukan dan saran dari para ahli serta rekan seprofesi untuk menambah keilmuan penelitian. Selanjutnya bila data pendukung yang diperlukan belum memadai, maka peneliti kembali ke lapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sampai penelitian layak dilaksanakan kelapangan.⁴⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan objek penelitian pada pemerintah Desa Ngabar sebagai pelaksana program SDGs Desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

4. Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data hasil dari wawancara pemerintah desaserta masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah. Adapun data tambahan atau penunjang penelitian sumber data seperti dokumen pemerintah, foto kegiatan serta sertifikat pemerintah desa dan lain sebagainya tambahan data.

⁴⁶ Ibid.

Adapun data yang digunakan Penulis pada penelitiannya yaitu tentang program-program SDGs Desa yang dilaksanakan di Desa Ngabar dengan tahun anggaran 2021, hal tersebut dilakukan dengan harapan akan mendapatkan data yang akurat, terfokus sesuai dengan tujuan dari penelitian.

5. Pengumpulan pada Data

Langkah utama dalam penelitian adalah pengumpulan data dan ini merupakan langkah strategis terhadap penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standart maupun tujuan penelitian.⁴⁷

Wawancara serta pengumpulan data merupakan teknik utama dalam penelitian. Dengan adanya wawancara mendalam diharapkan mampu memperoleh data yang akurat serta mengetahui kasus yang ada pada pemerintah maupun di luar pemerintah. Penelitian terlibat langsung dengan objek yang diteliti (*participant observation*) dengan observasi, dokumentasi untuk memahami kasus yang ada.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan untuk analisis penelitian, dengan teknik wawancara (*deskriptif*) dan lainya sebagai penunjang. Sebagai sumber data diantaranya observasi, dokumentasi, wawancara dan lain sebagainya.

7. PengecekanKeabsahan Data

Konsep penting pada penelitian adalah pengecekan terhadap keabsahan data, hal tersebut dilaksanakan agar mendapatkan data sesuai dengan harapan dan tujuan dari penelitian. Pada penelitian kualitatif pengecekan data menggunakan uji kredibilitas transferabilitas, konfirmabilitas serta dependabilitas.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan pembahasan dalam penulisan, maka akan dikelompokkan menjadi lima BAB dan pada BAB terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁴⁸ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

Bab ke-dua, kajian teori. Bab ini berisi tentang: pengertian efektivitas, pendekatan dalam pengukuran efektivitas, sejarah SDGs, pengertian SDGs Desa, dasar hukum pengaturan SDGs Desa, tujuan program SDGs Desa, arah dan pokok-pokok program kebijakan SDGs Desa, indikator SDGs Desa, prioritas SDGs Desa, pengelolaan keuangan desa, pengertian kesejahteraan masyarakat, konsep kesejahteraan Islam, tingkat kesejahteraan masyarakat, indikator kesejahteraan masyarakat, tujuan kesejahteraan masyarakat, fungsi kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

Bab ke-tiga, paparan data dan temuan penelitian. Bab ini berisi tentang data umum yang meliputi: topografi desa, demografi desa, data kemiskinan penduduk desa. Data khusus meliputi: pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Ngabar, efektivitas pelaksanaan SDGs Desa di Desa Ngabar, dan dampak pada program SDGs Desa dalam upaya kesejahteraan

atau memberdayakan masyarakat Desa Ngabar serta temuan penelitian.

Bab ke-empat, pembahasan. Bab ini berisi tentang: analisis pelaksanaan program SDGsDesa di Desa Ngabar, analisis efektivitas pelaksanaan pada program SDGsDesa di Desa Ngabar dan analisis dampak program SDGsDesa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar.

Bab ke-lima, penutup. Pada bab ini akan Penulis sajikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

SDGs DESA DAN KESEJAHTERAAN

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran dari keberhasilan dalam suatu program. Hasil dari suatu program dapat dirasakan oleh kelompok maupun organisasi. Sehingga program tersebut akan tepat pada sasaran maupun tujuan serta memberi manfaat dan nilai lebih. Hal di atas sesuai dari pendapat Caster I. Bernard yaitu efektivitas merupakan terwujudnya dari tujuan dan sasaran serta memberi manfaat bersama.⁴⁹

Efektifitas mempunyai arti berhasil tepat guna dan berasal dari kata efek (*etimologi*). Pada kamus besar (Kamus Bahasa Indonesia) Efektifitas adalah hasil pencapaian dari tujuan suatu program. Definisi secara termonologi sebagai berikut:

⁴⁹ Iwan Ridhwani, “*Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”, (Tesis, Pascasarjana Iain Ponorogo, 2020), 42.

- a. Pendapat dari Hidayat efektivitas merupakan ukuran yang bisa menyatakan sejauh mana target (kualitas, kuantitas, serta waktu) telah terlaksana, semakin tinggi prosentase yang tercapai, semakin besar efektivitasnya.⁵⁰
- b. Menurut Sedarmayanti bahwa seberapa besar target yang tercapai maka efektivitas semakin besar dalam ukuran prosentasenya.⁵¹
- c. Menurut Supriyono, semakin besar kontribusi yang dicapai maka semakin besar keberhasilan suatu target dimana efektifitas semakin besar pula yang dapat di raskan oleh masyarakat.⁵²
- d. Habey berpendapat bahwa tujuan dan sasaran yang tepat serta hasil yang dapat

⁵⁰ Rany An Nisaa Syabrina, “Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017”, *Unair Repository* (Juni, 2018), 3.

⁵¹ Sedarmayanti, “Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil”, (Bandung: Aditama, 2009), 72.

⁵² Supriyono, “Sistem Pengendalian Manajemen”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

- dirasakan merupakan penjabaran dari efektifitas.⁵³
- e. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan selesai pada tepat waktu inilah yang dinamakan efektifitas.⁵⁴
 - f. Agung Kurniawan berpendapat bahwa tugas yang dikerjakan dengan tanpa adanya tekanan dan mendapatkan hasil sesuai rencana ini yang dinamakan efektifitas.⁵⁵
 - g. Menurut Richard Steers bahwa efektivitas merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan sesuai harapan dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang atau kelompok masyarakat.⁵⁶
 - h. Robert Chambers berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan

⁵³ Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*", (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003), 16.

⁵⁴ Sondang P. Siagian, "*Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 151.

⁵⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), 109.

⁵⁶ M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980), 5.

kelompok organisasi yang dapat melaksanakan tugas fungsinya dengan baik tanpa adanya tekanan dan selesai dengan batas waktu yang ditentukan.⁵⁷

Dari penjabaran diatas efektifitas dapat didefinisikan bahwa sebagai ukuran pencapaian keberhasilan suatu program dari organisasi/kelompok dalam memberi manfaat. Dengan hal tersebut bahwa efektifitas tergantung pada proses yang dikerjakan mulai dari perencanaan.

2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas

Pada sebuah program atau mengukur efektivitas organisasi harus pada dasarnya mengetahui fungsi tujuan ataupun manfaat yang dirasakan serta fungsi dari keberhasilan.

Adapun kriteria dalam pengukuran efektivitas terdapat beberapa cara pendekatanyang bisa untuk dilaksanakan, antara lain:

⁵⁷ Robert Chambers, *“Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang”*, (Jakarta: LP3S, 1998), 47.

- a. Pendapat dari Martani dan Lubis, terdapat tiga cara pendekatan untuk pengukuran efektifitas, yakni:⁵⁸
- 1) Pendekatan terhadap sumber (*resource approach*). Pendekatan ini mengukur efektifitas dari proses input. Pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi/kelompok untuk memperoleh keberhasilan sumber daya fisik maupun nonfisik.
 - 2) Pendekatan terhadap proses (*process approach*). Mengetahui keberhasilan suatu program dengan mengidentifikasi pelaksanaan dan mekanisme kegiatan internal organisasi tersebut.
 - 3) Pendekatan terhadap sasaran (*goals approach*). Pengukuran dengan melihat hasil dari program yang dilaksanakan apakah sudah tercapai sesuai dengan rencana kegiatan organisasi.
- b. Menurut Richard M. Steers adalah:⁵⁹

⁵⁸ Hari Lubis, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian pada tujuan merupakan keseluruhan dari upaya maupun tujuannya sesuai rencana yang diharapkan. Tujuan pencapaian tersebut harus mampu memberikan manfaat individu maupun organisasi.

2) Integrasi

Integrasi yaitu merupakan pengukuran yang mampu memberikan dampak berkesinambungan antara program yang lainya sehingga mampu membentuk komunikasi berbagai organisasi lainya.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan dari individu atau sekelompok dengan penyesuaian terhadap tempat tinggal atau lingkunganya.

⁵⁹ M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, 9.

c. Pendapat dari Sondang P. Siagian sebagai berikut:⁶⁰

1) Tujuan rencana yang akan dicapai.

Arah tujuan suatu kelompok harus jelas dan mudah untuk dipahami sehingga mampu untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan maksimal.

2) Strategi terhadap pencapaian tujuan harus jelas.

Strategi merupakan siasat yang harus dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan dan diharapkan.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan.

Kebijakan harus sesuai dan mampu memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebagai dasar kebijakan.

⁶⁰ Sondang P. Siagian, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),77.

4) Perencanaan matang.

Perencanaan harus terukur dan berkelanjutan untuk pembangunan dimana harus bermanfaat untuk kehidupan sekarang ataupun masa depan.

5) Penyusunan program yang tepat.

Penyusunan program harus terukur dan terencana untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan mampu memberikan hasil yang signifikan dan maksimal.

6) Sarana dan pra sarana tersebut harus tersedia.

Tersedianya dari sarana dan pra sarana merupakan faktor penunjang penting dalam suatu program agar bisa mendapatkan hasil sesuai harapan.

7) Program dilaksanakan secara efektif serta efisien.

Pelaksanaan program harus efektif dan juga harus efisien agar tepat pada sasaran dan sesuai dengan rencana.

Program yang efektif harus mempunyai tujuan dan manfaatnya bisa dirasakan.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan agar bisa sampai tujuan yang telah ditentukan/diharapkan. Dengan harapan akan mampu memberikan manfaat yang maksimal.

d. Robert Chambers, berpendapat bahwa pengukuran efektivitas adalah:

- 1) Keberhasilan pada program
- 2) Keberhasilan pada sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program yang telah dilaksanakan
- 4) Tingkat *input* dan *output program*
- 5) Pencapaian tujuan.⁶¹

Efektivitas pelaksanaan program dapat terlaksana dengan sempurna jika rencana tersebut matang sehingga selesai dan bisa

⁶¹ Robert Chambers, “Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang”, 121.

dirasakan untuk manfaatnya semua golongan tepat sasaran.⁶²

B. SDGs Desa

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dengan nomor 13 tahun 2020 yang isinya merupakan prioritas proram penggunaan Dana Desa 2021. Program tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan dengan sebutan SDGs Desa. Dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan desa mempunyai arah serta tujuan pembangunan sesuai kontekstual desa dan manfaatnya bisa dirasakan sepanjang masa untuk generasi.

1. Sejarah SDGs

SDGs merupakan pedoman program berkelanjutan yang digagas oleh negara anggota PBB. Program tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dengan memberantas maupun menekan angka kemiskinan yang ada di semua

⁶² Ibid.

negara. Semua negara yang tergabung dalam anggota PBB menggunakan program SDGs sebagai dasar atau arah pembangunan dan berkelanjutan.

a. Sejarah SDGs Dunia

Sidang umum di Amerika Serikat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke 70 diikuti oleh 193 negara pada September 2015 merupakan sejarah dunia baru pada tatanan pembangunan. Sidang umum dihadiri 193 kepala negara yang tergabung dalam anggota PBB menyepakati dokumen pembangunan *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.⁶³Perjanjian daripada dokumen tersebut terdapat 17 tujuan arah pembangunan. Terdapat 169 sasaran pembangunan dengan diberlakukan sampai tahun 2030 dan dimulai dari tahun 2016.

Perjanjian atau dokumen tersebut diberi nama SDGs (*Sustainable*

⁶³<https://www.insandesa.web.id/indikator-indikator-sdgs-desa>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

Development Goals) sebagai pengganti dokumen sebelumnya MDGs (*Millennium Development Goals*) yang berakhir pada 2015 yang dicetuskan pada tahun 2000.⁶⁴ Perbedaan mendasar pada MDGs terdapat 8 tujuan, terdapat 21 sasaran, dan terdapat 60 indikator pembangunan. MDGs terfokus pada pembangunan negara kurang berkembang dan berkembang tanpa memperhatikan pada negara maju untuk keseimbangan dunia. MDGs sendiri terdapat kelemahan dalam penyusunan.

Dalam penyusunannya tanpa melibatkan dari stakeholder non pemerintah namun terfokus pada birokrasi pemerintah. Seperti halnya Civil Society Organization, sektor bisnis dan swasta, Akademisi serta kelompok lainnya tanpa dilibatkan sehingga hasil dari dokumen tersebut banyak kelemahan. Penyusunan SDGs bersifat pada universal yang mengakomodir dari berbagai

⁶⁴ Ibid.

pihak, sehingga memperoleh hasil yang maksimal demi kelangsungan hidup dunia. SDGs memberikan keseimbangan pada negara maju, berkembang maupun kurang berkembang.⁶⁵

Dokumen SDGs menitik beratkan pada kehidupan yang berkelanjutan yang memberikan kesejahteraan, menekan angka kemiskinan memberikan energi terbaru untuk sumber daya alam demi kelangsungan dunia.⁶⁶ Ketahanan pangan, pembukaan lahan pertanian, lingkungan hidup yang sehat air bersih tersedia sangat diperhatikan dalam dokumen SDGs karena semua itu merupakan faktor utama dalam kehidupan serta memberikan rasa aman dan tenteram semua negara.⁶⁷ Kesepakatan dalam dokumen SDGs memberikan dampak yang

⁶⁵https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf, [30 Maret 2021], diakses pada pukul 16.30 WIB

⁶⁶<https://www.insandesa.web.id/indikator-indikator-sdgs-desa>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

⁶⁷http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf, [29 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

luar biasa terkhusus bagi negara kurang berkembang dalam kehidupan bernegara.⁶⁸Pembangunan berkelanjutan menciptakan pembangunan lingkungan kemitraan global demi terwujudnya lingkungan hijau serta terbarukan perubahan iklim.⁶⁹

b. Sejarah SDGs Indonesia

Pembangunan berdasar pada SDGs merupakan pembangunan yang memberikan keseimbangan antara yang sekarang di laksanakan dan pada masa yang akan datang. Pembangunan ini merupakan pembangunan yang memberikan dampak yang positif demi berlangsungnya kehidupan. Ketahanan pangan, lahan pertanian merupakan salah satu terpenting yang harus diperhatikan sebagai keberlangsungan dan kelanjutan

⁶⁸http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf , [29 Maret 2021], diakses pada pukul 20.45 WIB

⁶⁹https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english.pdf , [29 Maret 2021], diakses pada pukul 20.00 WIB

dan menekan pada kemiskinan global. SDGs nasional harus menjadi perhatian khusus setiap warga negara demi kesinambungan ekonomi sosial yang mampu menekan angka kemiskinan dan tersedianya pangan untuk setiap warga negara.

Hadirnya peran dari negara sangat penting guna untuk menginterfensi dan memastikan SDGs berjalan beriringan untuk pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, lingkungan iklim global dengan mengedepankan prioritas kepentingan negara. Pemerintah dalam melaksanakan SDGs menunjukkan keseriusan dari pada melaksanakan MDGs. Dalam pelaksanaan MDGs pemerintah mengalami keterlambatan 10 tahun semua itu dipicu dari krisis yang terjadi dari tahun 1998.

Dan tahun ini merupakan tahun pemulihan pasca krisis yang melanda negara.⁷⁰

Pada penandatanganan SDGS September 2015 dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan pemerintah siap untuk mengadopsi SDGs sebagai dasar pembangunan nasional. Tahun 2030 negara dunia khususnya negara Indonesia bebas dari kemiskinan menjadi 0% angka kemiskinan. SDGS memiliki 17 tujuan serta 168 sasaran untuk kehidupan.

Pembangunan SDGs Nasional dilaksanakan secara transformatif dari pusat sampai ke daerah. Pemerintah bertanggungjawab penuh demi program SDGs berjalan sesuai harapan kesepakatan dunia (*no one left behind*).⁷¹ Pemerintah harus berperan aktif demi terwujudnya

⁷⁰http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordren.pdf, [29 Maret 2021], diakses pada pukul 20.20 WIB

⁷¹https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf, [30 Maret 2021], diakses pada pukul 16.30 WIB

SDGs Global untuk kehidupan antar negara.⁷² Kelompok masyarakat sipil misalnya, yang telah bertemu dengan beberapa stakeholder kunci pemerintah untuk mendorong isu SDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal yang sama mulai dilakukan oleh stakeholder lainnya seperti sektor swasta dan bisnis serta kalangan akademisi.

2. Pengertian SDGs Desa

SDGs Desa merupakan program Kementerian Desa dan salah satu programnya untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan rasa aman. SDGs Desa sebuah program baru yang di cetuskan Kementerian Desa Perendes no 13 tahun 2020 sebagai dasar pembangunan desa yang berkelanjutan. SDGs Desa merupakan program pembangunan berkelanjutan yang prioritas di dukung oleh Dana Desa.⁷³

3. Dasar hukum SDGs Desa

⁷² Ibid.

⁷³ <https://jojogan.desa.id/2021/03/pendataan-sdgs-desajojogan-pengertian-tujuan-dan-sasaran> , [28 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

- a. Perpres(Peraturan Presiden) Nomor 59 Tahun 2017 (Pembangunan Berkelanjutan)
 - b. Peraturan Menteri(Permendes) PD TT No. 13 Tahun 2020 (Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021)
 - c. Peraturan Menteri(Permendes) No. 21 Tahun 2020 (Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa)
 - d. SE (Surat Edaran) dari Menteri Desa No. 17 Tahun 2020 (Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021)
 - e. Surat plt ditjen PDP, daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 maret 2021 tentang pendataan IDM berbasis SDGs.⁷⁴
4. Tujuan sasaran program SDGs Desa

Merujuk dari Permendes PD TT No 13 Tahun 2020 (Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021), terdapat 18 tujuan maupun sasaran pada SDGs Desa, yaitu:

- a. Desa Tanpa Kemiskinan,

⁷⁴<https://www.insandesa.web.id/indikator-indikator-sdgs-desas>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

- b. Desa Tanpa Kelaparan
 - c. Desa Sehat Dan Sejahtera,
 - d. Pendidikan Desa Berkualitas
 - e. Desa Berkesetaraan Gender
 - f. Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi
 - g. Desa Yang Berenergi Bersih Dan Terbarukan
 - h. Pekerjaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
 - i. Inovasi Dan Infrastruktur Desa
 - j. Desa Tanpa Kesenjangan
 - k. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
 - l. Konsumsi Dan Produksi Desa Yang Sadar Lingkungan
 - m. Pengendalian dan Perubahan Iklim Oleh Desa
 - n. Ekosistem Laut Desa
 - o. Ekosistem Daratan Desa
 - p. Desa Damai dan Berkeadilan
 - q. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
 - r. Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptif.⁷⁵
5. Arah dan pokok-pokok program kebijakan SDGs Desa

⁷⁵<https://www.insandesa.web.id/indikator-indikator-sdgs-desa>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

Kebijakan Pemerintah dalam mencanangkan desa tanpa kemiskinan merupakan prioritas pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa untuk memberikan masyarakat terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kebutuhan ekonomi terpenuhi, pendidikan yang berkualitas merupakan modal utama untuk menekan angka kemiskinan. Dalam masa Pandemi 10 prioritas SDGs Desa harus terpenuhi sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk pemulihan ekonomi skala Nasional.⁷⁶

Prioritas SDGs Desaterdapat 10 poin pada masa pandemi Covid-19 yaitu:

- a. Desa Tanpa Kemiskinan
- b. Desa Tanpa Kelaparan
- c. Desa Sehat Sejahtera

⁷⁶ A. Halim Iskandar, “*Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 13 Tentang Penggunaan Dana Desa 2021*” (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2021): 12

<https://www.insandesa.web.id/indikator-indikator-sdgs-desa>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

- d. Keterlibatan Perempuan Desa
 - e. Desa Berenergi Bersih Dan Terbarukan
 - f. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
 - g. Konsumsi Dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
 - h. Desa Damai Berkeadilan
 - i. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
 - j. Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptif.⁷⁷
6. Indikator SDGs Desa

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa ini adalah

- a. Pada tahun 2030 kemiskinan desa mencapai 0%
- b. Kepala keluarga perempuan (PEKKA) penyandang difabilitas miskin 100% menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan tercukupi
- c. Kebutuhan air bersih harus tercukupi 40% penduduk penghasilan rendah.
- d. Pelayanan pendidikan berkualitas

⁷⁷ Ibid.

- e. Penduduk penghasilan rendah harus mendapatkan hunian yang layak sebagai tempat tinggal.
 - f. Kebutuhan dasar harus terpenuhi
 - g. Masyarakat produktifitas untuk memenuhi kebutuhan dasar
 - h. Kesamaan hak dan kewajiban perempuan di pemerintah desa
 - i. Pada Perangkat desa atau BPD
 - j.** Hak dan kewajiban perempuan dalam berkarir atau pendidikan dan memperoleh pelayanan.
7. Prioritas SDGs Desa

Prioritas program SDGs Desa untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Serta mendapatkan hak pada kebutuhan dasar kehidupan, sarana maupun prasarana desa tercukupi, pada aspek ekonomi mudah dan merata serta lingkungan (Sumber Daya Alam) bisa dimanfaatkan berkelanjutan tanpa merusaknya.

Terdapat 8 tipologi dari 18 prioritas pembangunan program SDGS Desa antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan yang pertama desa tanpa adanya kemiskinan maupun kelaparan
SDGs Desa 1: Desa bebas dari kemiskinan
SDGs Desa 2: Desa bebas dari kelaparan.
2. Pertumbuhan ekonomi secara merata
SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi merata
SDGs Desa 9: Infrastruktur desa mudah
SDGs Desa 10: Desa terhindar kesenjangan
SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi
3. Aktif serta peduli terhadap kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi
SDGs Desa 11: Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
4. Aktif terhadap lingkungan (SDA)
SDGs Desa 7: Desa diharapkan berenergi bersih dan terbarukan
SDGs Desa 13: Tanggap perubahan iklim

- SDGs Desa 14: Peduli lingkungan laut
- SDGs Desa 15: Peduli lingkungan darat
- 5. Peduli pendidikan (berkualitas)
 - SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas
- 6. Ramah serta peduli terhadap perempuan
 - SDGs Desa 5: Hak dan kewajiban terpenuhi
- 7. Desa bermitra strategis serta produktif
 - SDGs Desa 17: Mitra (berjaring) untuk pembangunan desa
- 8. Peduli serta tanggap terhadap budaya
 - SDGs Desa 16: Adil serta peduli
 - SDGs Desa 18: Budaya lokal desa.⁷⁸
- 8. Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan keuangan desa terdapat 5 unsur tahapan pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga penatausahaan, keempat pelaporan dan kelima pertanggungjawaban.⁷⁹

1. Perencanaan Desa

⁷⁸ Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia *Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 13 Tahun 2021*.(2021):18

⁷⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Perencanaan desa merupakan kinerja dari kepala urusan keuangan. Pada pelaksanaan ini merupakan pembukuan dari setiap pengeluaran serta penerimaan yang berdasar pada APBDes. Sekretaris Desa sebagai pemegang utama dalam penyusunan APBDesa berdasar pada penyusunan RKPDesa.

RKPDesa disusun berdasarkan musyawarah yang ada didesa mulai dari penggalian gagasan dari RT maupun dari dusun. Penggalian gagasan ataupun usulan dibawa ke desa melalui Muyawarrah Desa yang di sepakati antara Desa dan BPD dan akhirnya disyahkan menjadi APBDesa sebagai dasar pembangunan selama satu tahun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebagai pengawas pembangunan. Kaur maupun Kasi pelaksana melaksanakan pembangunan sesuai APBDes terperinci dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Setiap kegiatan pembangunan selesai Kaur maupun Kasi

pelaksana memberikan hasil kerja kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa menerima hasil kerja dan mengevaluasi kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan hasil kerja pembangunan ke Kepala Desa.

3. Penatausahaan⁸⁰

Kaur Keuangan merupakan bendahara dalam kegiatan pembangunan. Kaur keuangan bertanggungjawab atas pengeluaran ataupun pemasukan uang desa. Bendahara desa wajib membukukan atas keluar atau masuknya uang pada buku kas umum.

Bendahara desa bersama Kepala Desa mencairkan kebutuhan untuk pembayaran keuangan desa pada bank yang ditunjuk pemerintah sebagai sarana transfer dari pemerintah pusat.

4. Pelaporan

Pelaporan Kepala Desa atas kinerja pembangunan desa terhadap

⁸⁰ Ibid

Bupati dilaksanakan oleh Camat selaku pembina pembangunan desa pada setiap 6 bulan (semester).

Laporan Kepala Desa kepada Bupati sebagai berikut:

- 1) Pelaporan pada pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam APB Desa
- 2) Pelaporan pada realisasi pembangunan desa (kegiatan desa).⁸¹

Kepala Desa membuat laporan kepada Bupati maksimal minggu kedua pada bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa sesuai realisasi APBDesakepada Bupati dengan memperhitungkan waktu maksimal 3 bulan dari tahun berakhirnya anggaran pembangunan.

Peraturan Pertanggungjawaban Desa tersebut sebagai berikut antara lain:

⁸¹ Ibid

- 1) Pelaporan anggaran (KeuanganDesa) dan terdiri dari:
 - a. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan realisasi anggaran pada APBDesa
 - b. Pencatatan dari pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan
- 4) Daftar laporan program sektoral lainnya yang masuk ke desa.⁸²

C. Kesejahteraan Terhadap Masyarakat

1. Pengertian kesejahteraan pada masyarakat

Merujuk dari katadan bahasa bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu *Welfare* dan *Community* berasal dari bahasa Inggris. *Welfare* yang mempunyai arti kesejahteraan dan arti *Community* yaitu masyarakat atau

⁸² Ibid

komunitas.⁸³ Pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: keadaan sejahtera dan meliputi rasa makmur, aman, maupun selamat, tenteram.⁸⁴

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun empat indikator yaitu:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*).⁸⁵

Kesejahteraan menurut Rambe adalah semua warga negara bisa memenuhi kebutuhannya sendiri baik jasmani maupun rohani dan mencakup rasa aman, rasa tenteram dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Kesejahteraan menurut Fahrudin adalah terpenuhi kebutuhan pokok serta kualitas hidup

⁸³ Hornby., *Oxford Advanced Learner's Dictionary Third Edition*. Newyork: Oxford University Press. (2000): 344.

⁸⁴ <https://kbbi.web.id/sejahtera.html>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.30 WIB

⁸⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 60.

⁸⁶ Wijayanti dan Ihsannudin., "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Agroekonomika*, 2 (2), (2013): 140.

yang memberikan rasa ketenangan dan aman tanpa adanya rasa takut ataupun intimidasi dari manapun. Kesejahteraan dalam hal bisa mencukupi kebutuhan dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.⁸⁷ Kesejahteraan tidak terpaku pada ekonomi namun pada kehidupan sosial, hukum yang sama dan hak politik yang sama.⁸⁸

Undang-undang No 11 yang di keluarkan pada Tahun 2009 menyebutkan dan mencakup bahwa kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhi semua kebutuhan baik pada kebutuhan materi maupun kebutuhan beragama serta dalam kehidupan sosial.⁸⁹

2. Konsep kesejahteraan dalam Islam

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berkonsep pada kesejahteraan Islam. Pada karya Al-Ghazali termaktup konsep

⁸⁷ Rosni., “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. *Jurnal Geografi*, 9 (1), (2017): 57.

⁸⁸ M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.

⁸⁹ Undang-undang, “*Kesejahteraan Sosial* “ No 11 Tahun 2009. <http://peraturan.bpk.go.id>, [26 Maret 2021], diakses pada pukul 20.00 WIB

kemslahatan umat serta kesejahteraan bersama. Pemikiran Al-Ghazali untuk kesejahteraan umat terdapat lima tujuan dasar yang harus diperhatikan yang pertama pada dasar agama, yang kedua pada jiwa, yang ketiga pada keturunan, yang keempat pada harta benda dan yang kelima pada akalunya.⁹⁰

Pada pandangan Islam, masyarakat sejahtera apabila terpenuhi dari dua kriteria:

1. Terpenuhi atau tersedianya kebutuhan pokok pada setiap individu umat; diantaranya pangan, ada sandang, ada papan, ada pendidikan, ada kesehatan.
2. Terjaganya maupun terlindungi pada agama, pada harta, pada jiwa, pada akal, dan pada kehormatan umat.⁹¹
3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat dimulai dari tingkat keluarga. Kesejahteraan pada keluarga menurut pendapat

⁹⁰ Al-Ghazali, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017). Cet.4.

⁹¹ M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.

Widiastuti mempunyai beberapa tahapan dan tingkatan, antara lain:⁹²

a. Tingkat Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar (*basicneeds*). Kebutuhan secara manual, seperti kebutuhan terhadap pangan, kebutuhan terhadap sandang, kebutuhan terhadap papan, kebutuhan terhadap kesehatan, dan kebutuhan terhadap pendidikan.

b. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan ini terpenuhi tidak secara keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychologicalneeds*). seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.

⁹² Widiastuti, Siti Kurnia, Dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015): 41-42.

c. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologinya, akan tetapi belum dapat terpenuhi dari seluruh kebutuhan pengembangannya (*Development Needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.⁹³

d. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga dapat memenuhi seluruh dari kebutuhan dasarnya sendiri. Pada kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum bisa untuk memberikan harta benda (*kontribusi*) maksimal kepada orang lain (umat).

⁹³ Ibid.

- e. Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
Keluarga yang telah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup secara keseluruhan. Terhadap pada kebutuhan dasar, terhadap kebutuhan sosial, serta dapat berkontribusi memberikan harta bendanya kepada orang lain untuk kesejahteraan umat.⁹⁴

4. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan indikator aspek kehidupan, yaitu:

- a. Tingkat kualitas hidup segi materi

Pada segi materi terpenuhi rumah untuk tempat tinggal, terpenuhi akan pangan danakan kebutuhan materi lain sebagainya

- b. Tingkat kualitas hidup segi fisik.

Terpenuhi akan kebutuhan pada kesehatan, akan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya

- c. Tingkat kualitas hidup segi mental.

⁹⁴ Ibid.

Terpenuhi akan kebutuhan pada fasilitas pendidikan, kebutuhan lingkungan sosial maupun budaya dan lain sebagainya

d. Tingkat kualitas hidup segi spiritual.

Terpenuhi kehidupan pada moral, pada etika, pada keserasian penyesuaian hidup, dan lain sebagainya.⁹⁵

Dilihat dari Badan Pusat Statistik bahwa kesejahteraan pada sosial tersebut terdapat delapan indikator yaitu:

a. Tingkat penduduk masyarakat.

Meliputi jumlah maupun laju dari tingkat pertumbuhan penduduk serta kepadatan penduduk

b. Tingkat untuk sehat masyarakat.

Meliputi tersedianya fasilitas untuk kesehatan serta kesehatan ibu hamil atau anak pada usia di bawah lima tahun

c. Tingkat pada kependidikan

⁹⁵ DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 1.

Meliputi fasilitas pendidikan memadai, kemampuan terhadap menulis ataupun membaca

d. Tingkat ketenagakerjaan

Meliputi lapangan pekerjaan yang memadai guna perputaran ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

e. Tingkat taraf dan pola konsumsi masyarakat

Meliputi kebutuhan keluarga dalam biaya kehidupan sehari-hari

f. Tingkat perumahan dan lingkungan sekitar

Meliputi kebersihan dan kualitas tempat tinggal

g. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan pada angka status sosial kemiskinan dimasyarakat

h. Tingkat sosial

Meliputi tingkat kehidupan dalam mendapatkan hiburan maupun kehidupan

sosial budaya serta mudah dalam akses teknologi.⁹⁶

Mengacu pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Bahwa ukuran indikator kesejahteraan terdapat 5 tingkatan sebagai berikut:

a. Terdapat enam indikator pada tingkatan Keluarga Sejahtera I sebagai berikut:

Anggota keluarga bisa terpenuhi kebutuhan makan minimal 2 kali dalam satu hari atau bisa lebih;

- 1) Pada anggota keluarga memilikipakaian beda pakaian dirumah, pakaian untuk jalan-jalan, pakaian untuk bekerja, maupun pakaian untuk sekolah;
- 2) Tempat tinggal beratap, berlantai, berdinging
- 3) Apabila ada keluarga yang sakit bisa di periksakan

⁹⁶[www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan -pdf](http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-pdf) [1 April 2021], diakses pada pukul 20.34 WIB :160.

- 4) Apabila keluarga KB bisa di bawa ke sarana kesehatan
 - 5) Usia anak 7-15 tahun bisa mendapatkan pendidikan⁹⁷
- b. Tingkat Keluarga Sejahtera II terdapat delapan, antara lain:
- 1) Semua anggota keluarga bisa melaksanakan ibadah
 - 2) Satu minggu sekali anggota keluarga bisa menikmati makan telur, daging atau ikan
 - 3) Anggota keluarga paling tidak satu tahun sekali bisa membeli pakaian
 - 4) Ukuran lantai rumah tiap penghuni 8 m²
 - 5) Dalam waktu 3 bulan anggota keluarga tidak sakit
 - 6) Minimal 1 anggota keluarga bisa bekerja/berpenghasilan

⁹⁷ Rosni., “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. *Jurnal Geografi*, 9 (1), (2017):58-59.

- 7) Usia 10-60 tahun bisa membaca dan menulis
 - 8) Minimal 2 anak hidup dalam keluarga menggunakan kontrasepsi (PUS).⁹⁸
- c. Tingkat III dalam keluarga sejahtera, meliputi:
- 1) Mendapatkan pengetahuan agama
 - 2) Bisa menabung dalam bentuk barang atau uang
 - 3) Anggota keluarga bisa makan bersama minimal 1 kali dalam sehari
 - 4) Kegiatan lingkungan semua anggota keluarga bisa melaksanakan
 - 5) Semua anggota keluarga bisa menikmati semua informasi media (TV, Radio, surat kabar, majalah, koran)
- d. Tingkat III Plus keluarga sejahtera, meliputi:

⁹⁸ Ibid.

- 1) Dalam kegiatan sosial keluarga suka rela memberikan harta benda yang dimilikinya
- 2) Dalam kegiatan sosial atau perkumpulan terdapat anggota keluarga yang aktif.⁹⁹

5. Tujuan dari Kesejahteraan

a. Kesejahteraan dalam masyarakat terdapat tujuan:

- 1) Pencapaian keluarga dalam kehidupan yang mampu dan sejahtera dan terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan berinteraksi penuh dengan masyarakat tempat tinggal
- 2) Pencapaian hidup bermasyarakat yang memuaskan dan mampu mengembangkan sumber-sumber taraf kehidupan sehari-hari.¹⁰⁰
- 3) Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu:

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

a) Pemeliharaan suatu sistem

Menjaga maupun memelihara norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat serta keberlangsungan hidup bersama masyarakat yang selalu memberikan informasi dan saling menasehati dan memberi¹⁰¹

b) Pengawasan terhadap sistem

Pengawasan perilaku menyimpang terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memberikan solusi terbaik untuk kehidupan bermasyarakat atau diri pribadi¹⁰²

c) Perubahan terhadap sistem

Memberikan solusi yang lebih mudah terhadap sistem bermasyarakat serta meninggalkan pola yang

¹⁰¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Erlangga, 2009), 110-111

¹⁰² Ibid.

sekiranya merugikan masyarakat atau pribadi demi kehidupan yang harmonis di masyarakat¹⁰³

6. Fungsi dari Kesejahteraan Masyarakat

Menghindarkan dari tekanan perubahan ekonomi masyarakat yang merugikan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dalam fungsi dan tujuan sebagai berikut:

a. Fungsi *Preventive* (Pencegahan)

Terhindar dari masalah sosial dan memeperkuat kehidupan sosial masyarakat agar mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri.¹⁰⁴

b. Fungsi *Curative* (Penyembuhan)

Mengharapkan masyarakat terhindar dari emosional yang mampu merugikan bermasyarakat sehari-hari sehingga bisa

¹⁰³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 10.

¹⁰⁴ Ibid.

melaksanakan kehidupan yang aman dan nyaman.

c. Fungsi *Development* (Pengembangan)

Mengembalikan kehidupan sosial secara wajar dan menghilangkan kehidupan sosial yang selalu menekan pada emosional. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kerugian pada masyarakat serta lingkungannya.¹⁰⁵

d. Fungsi *Development* (Pengembangan)

Mendapatkan manfaat yang langsung atau tidak dalam pengembangan masyarakat sosial dengan tujuan memberikan dampak yang positif untuk kehidupan sosial masyarakat

e. Fungsi *Supportive* (Penunjang)

Mampu memberikan manfaat dalam pelayanan dan pengembangan masyarakat dalam kehidupan sosial¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nur Chamid. *Jejak langkah sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280-281

¹⁰⁶ Ibid.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan

Pelaksanaan program pada kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 1) Mendorong dan memberikan kemampuan seseorang untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik dan wajar
- 2) Memberikan motivasi maupun konseling demi terciptanya masyarakat sosial yang selalu berpegang teguh terhadap nilai dan norma yang berlaku.¹⁰⁷

b. Jaminan Sosial Masyarakat

- 1) Terpenuhi kebutuhan dalam jaminan sosial untuk meringankan kebutuhan (asuransi) sehari-hari untuk masyarakat miskin, kaum duafa, penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

¹⁰⁷ Ibid.

- 2) Memberikan jaminan kehidupan untuk para pejuang maupun perintis kemerdekaan untuk menghargai jasanya.¹⁰⁸

c. Pemberdayaan Sosial Masyarakat

- 1) Memberikan pelatihan terhadap keluarga atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam ekonomi serta pendampingan
- 2) Penguatan terhadap kelembagaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi tepenuhi kebutuhannya. Memberikan stimulus untuk usahanya serta memberikan pendampingan untuk akses usahanya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Rosni., “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”.*Jurnal Geografi*, 9 (1), (2017):58-59.

¹⁰⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2014), 140

d. Perlindungan Sosial Masyarakat

Memberikan bantuan hukum atau bantuan sosial untuk kelangsungan hidup agar terpenuhi minimal kebutuhan dasar.¹¹⁰

¹¹⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar kesejahteraan sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), 110-115.

BAB III

SDGs DESA DI DESA NGABAR

A. Gambaran Umum Ekonomi Masyarakat Desa

Ngabar

1. Topografi Desa

Desa Ngabar terletak di Kecamatan Siman selatan dari pusat pemerintahan kabupaten Ponorogo. Menuju pusat pemerintahan Ponorogo memerlukan 15 menit dengan jarak tempuh 17 KM. Sedangkan menuju pusat pemerintahan Kecamatan Siman memerlukan waktu 7 menit dengan jarak 5 KM. Desa Ngabar termasuk wilayah yang setrategis. Wilayah tidak terlalu jauh dari pusat kota, dekat dengan jalan jalur Propinsi arah menuju Kabupaten Trenggalek dan juga arah dari Kabupaten Pacitan. Letak Desa Ngabar dari kedalaman permukaan laut 125 mdpl dan sebagian besar adalah tanah pemukiman ataupun tanah kering.¹¹¹

¹¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo/BPS

Batas dari desa Ngabar adalah

- 1) Desa Ngabar berbatasan Desa Winong Kecamatan Jetis untuk sebelah barat
- 2) Desa Ngabar berbatasan Desa Winong Kecamatan Jetis untuk sebelah selatan
- 3) Desa Ngabar berbatasan Desa Demangan Kecamatan Siman dan Desa Jabung Kecamatan Mlarak untuk sebelah timur
- 4) Desa Ngabar berbatasan Desa Beton Kecamatan Siman untuk sebelah utara¹¹²

2. Demografi

Desa Ngabar mempunyai letak yang strategis yang dekat dengan jalan utama propinsi maupun jalan utama daerah Kabupaten. Kantor Desa atau pusat pemerintahannya berada pada jalan utama poros desa sehingga masyarakat Desa Ngabar mudah untuk mengakses menuju kantor desa. Desa Ngabar terdapat 14 RT dan 3 Kepala Dusun serta mempunyai luas wilayah 162,03 Ha yang terdiri dari:

¹¹² Peta Desa Tahun 2021

- 1) Perumahan (Pemukiman): 82,88 Ha
- 2) Tanah Basah (Sawah) : 69,50 Ha
- 3) Fasilitas untuk umum (Fasum) : 9,65 Ha¹¹³

Pemukiman atau perumahan di Desa Ngabar setengah dari luas wilayah desa dengan jarak yang tidak jauh dengan tetangga. Pemukiman ini merupakan tanah kering yang di gunakan untuk perumahan masyarakat dan belakang rumah untuk ladang bertanam seperti singkong, hijauan untuk pakan ternak. Sawah di Desa Ngabra terdapat 69,50 Ha dan ini merupakan tanah basah dan bisa panen 3 kali dalam satu tahun. Desa Ngabar merupakan tanah yang produkti dalam pertanian ini terbukti petani bisa menanam padi melon, lombok, tomat dan lain-lain mengikuti musim masa tanam. Di tambah disini pengairan cukup mudah dari irigasi ataupun dari sumur buatan seperti sumur sibel.

Pada tahun 2021 Desa Ngabar mempunyai jumlah penduduk 2.381 jiwa. Jumlah penduduk untuk laki-lakisebanyak1.155 jiwa. Sedangkan untuk

¹¹³ Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021

jumlah penduduk perempuan 1.226 jiwa. Berdasarkan pada jumlah kepala keluarga laki-laki 635 KK. Berkepala keluarga perempuan sebanyak 146 KK. Dengan pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Berdasar pada pengelompokan jenis kelamin

Tabel 1
Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kepala Keluarga

Jenis Kelamin	Jiwa	KK
Laki-laki	1.155	635
Perempuan	1.226	146
Jumlah	2.381	781

- 2) Berdasarkan usia

Tabel 2
Berdasar PadaKelompok Usia

Usia	Kelompok	Jumlah Jiwa
1-5 Tahun	Balita	188
6-12 Tahun	Anak-anak	217
13-18 Tahun	Remaja	201
19-50 Tahun	Dewasa	1.296
51 -	Manula	479
Jumlah		2.381

Pengelompokan berdasarkan pada usia terdapat 188 dalam usia Balita di bawah umur 5 Tahun, usia sekolah dasar terdapat 217 jiwa, usia remaja terdapat 201 jiwa. Untuk usia produktif terdapat 1.296 jiwa dan usia manula terdapat 479 jiwa.

3) Berdasarkan tingkat kesejahteraan

Tabel 3
Berdasarkan Pada Tingkatan Kesejahteraan

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Kepala Keluarga
Miskin	88
Prasejahtera	255
Sejahtera KS I	179
Sejahtera KS II	114
Sejahtera KSIII	93
Sejahtera KS III Plus	52
JUMLAH	781

sarkan pada tingkat kesejahteraan terdapat 88 KK yang di kategorikan miskin dan kurang mampu ini merupakan usia manula yang sudah tidak bisa bekerja dan menderita sakit ataupun sudah lemah pada fisik/tubuhnya. Penduduk pra sejahtera terdapat 255 KK merupakan penduduk tidak mamapu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk

makan, tempat tinggal, kesehatannya dan pendidikannya. Penduduk sejahtera I terdapat 179 KK dan penduduk ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk sejahtera II terdapat 114 KK dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar maupun tercukupi pada kebutuhan informasi media. Penduduk sejahtera III terdapat 93 KK sudah terpenuhi kebutuhan dasar dan ikut berpartisipasi terhadap lingkungan. Penduduk sejahtera III Plus terdapat 52 KK terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan ikut berpartisipasi terhadap lingkungannya seperti memberikan zakat kepada orang lain secara tetap dan ikut andil dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya.

4) Berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4
Berdasarkan Pekerjaan

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
Bekerja Buruh Tani	229
Bekerja Petani	347
Bekerja Peternak	224
Bekerja Pedagang	67
Bekerja Tukang Kayu	26
Bekerja Tukang Batu	35
Bekerja Penjahit	15

Bekerja Dosen	16
Bekerja Guru	114
Bekerja PNS	20
PNS (Pensiun)	3
Bekerja TNI-POLRI	3
Bekerja Wiraswasta	154
Bekerja Karyawan Swasta	183
Bekerja Perangkat Desa	12
Lain-lain	179

Desa Ngabar merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Tercatat jumlah penduduk bermata pencaharian petani atau buruh tani adalah 576 orang (petani 347, buruh tani 229) dari total 1.374 orang yang sudah bekerja. Oleh karena itu, masyarakat desa Ngabar sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

3. Data Kemiskinan Penduduk Desa

Tabel 5
Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan	Jumlah kepala keluarga
Penduduk Miskin	88
Prasejahtera	255
Sejahtera KS I	179
Sejahtera KS II	114

Sejahtera KS III	93
Sejahtera KS III Plus	52
JUMLAH	781

Data distribusi bantuan untuk kemiskinan

Tabel 6
Jumlah Penduduk Miskin

Distribusi Bantuan	Kepala keluarga
BLT DD	60
PKH	192
ZAKAT	36
BPNT	103
Donatur Tidak Tetap	3
JUMLAH	394

Distribusi bantuan untuk pengentasan kemiskinan di Desa Ngabar dilaksanakan dengan cermat dan teliti kordinasi dengan RT dan karang taruna setempat. Bantuan langsung tunai dari Dana Desa (BLTDD) terdapat 60 KK dan bisa di caerkan setiap bulan. Batuan Dari Kementerian Sosial dari program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 192 KK yang diambil dari keluarga yang mempunyai anak sekolah dan data ini langsung dari pusat. Bantuan Zakat terdapat 36 KK yang tersalurkan dari rumah

Zakat. Untuk bantuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program dari kementerian sosial yang langsung mendapatkan berupa bahan pokok seperti beras, gula, minyak, telur, daging dan lain-lain terdapat 103 KK dan ini langsung dari pusat. Donatur tetap yang tidak mengikat terdapat 3 KK ini merupakan penggalangan dana dari masyarakat sendiri dan disalurkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

B. Pelaksanaan Program SDGs Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai program SDGs Desa dalam pelaksanaannya yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas program penggunaan Dana Desa Tahun 2021, terfokus 2 poin sasaran. Desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan yang diambil dari 18 tujuan dan sasaran pembangunan SDGs Desa. Dalam taat administrasi pengelolaan keuangan desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan nomor 20. Pengelolaan ini meliputi 5

unsur yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.¹¹⁴

1. Perencanaan.

Perencanaan ini dikordinasi oleh Sekretaris Desa dalam penyusunan RKPDesa yang akan di gunakan selama 1 tahun anggaran desa. Dalam perencanaan ini berpedoman pada APBDes yang diatur oleh peraturan Bupati/Wali Kota.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak SR selaku Kepala Desa:

”Dalam pelaksanaan program SDGs Desa ini berbasis pembangunan yang berkelanjutan. Istilahnya begini sekarang membangun dan manfaatnya harus dinikmati anak cucu kita jadi tidak sekedar membangun namun harus dipikirkan dengan matang input output dan incomenya pembangunan. Inilah salah satu yang saya sukai dari pembangunan berbasis SDGs Desa ini. Untuk pembangunan berkaitan erat dan tidak terlepas pada Dana Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Negara langsung ke Rekening Kas Desa dan langsung bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan ini yang jelas hasil akhirnya Rencana Kerja Pembangunan Desa yang biasa di sebut RKPDes mas... dan RKPDes ini berpedoman

¹¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

pada RPJMDes.. RPJMDes ini visi dan misi saya mas... selama menjabat Kepala Desa untuk kinerja 6 tahun. Sebenarnya urutannya itu begini, selama 6 tahun saya menjabat saya membuat RPJMDes yang ini merupakan visi isi saya untuk membangun desa. RPJMDes ini selama 6 tahun ini ya dibagi per tahun mas.. dan visi misi saya ini per tahun dibuat mas dan menjadi RKPDes setelah ini yaaa.... saya tandatangani bersama BPD lewat Musyawarah Desa atau Musdes dan mengundang semua unsur yang ada di desa dari perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keterwakilan dari Karang Taruna, dari Perempuan dan lain-lain. Dan selanjutnya menjadi APBDes yang saya gunakan sebagai dasar pembangunan selama satu tahun anggaran. Dan tahun berikutnya yaa membuat lagi seperti ini mas...”¹¹⁵

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak SM selaku Sekretaris Desa bahwasanya:

”Begini mas.. untuk pelaksanaan program SDGs Desa ini berbasis pembangunan yang berkelanjutan, masih tetap mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena ini sebagai dasar pengelolan keuangan desa. Pertama itu di desa mengadakan Musdus yaitu musyawarah setiap dusun yang dipimpin oleh

¹¹⁵ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

kepala dusun bahanya dari membuka RPJMDes dan mereka memilah usulan apa yang ada di dusun tersebut untuk diajukan pembangunan. Setelah itu diajukan kedesa bersama dengan dusun lainya. Dan desa membuat tim verifikasi untuk memverifikasi usulan dari dusun. Maksudnya diverifikasi ini diranking mas usulanya itu mana yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan pertama kedua dan seterusnya. Jika usulan tersebut tidak terdani karena dananya dari pemerintah itukan terbatas mas.. akan menjadi prioritas pembangunan tahun berikutnya. Setelah verifikasi selesai dan ini di musdeskan dan ditandatangani Kepala Desa dan BPD.”¹¹⁶

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

”Begini mass.. pembangunan yang dikerjakan pemerintah desa itu semua untuk kepentingan masyarakat desa mulai dari dalam kandungan sampai meninggal. Bahkan belum adapun kita alokasikan seperti pra nikah itu lo mass.. paham kan.. hahahahaaa.. Pembangunan ini tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok mass... semua terperinci dari saya pertama menjabat yaitu membuat perencanaan desa termuat dalam RPJMDes sampai sekarang. Semua ada SPJnya nanti tanya sama Sekretaris

¹¹⁶ SM, Wawancara, Sekretaris Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

Desa untuk lengkapnya mas... Sedangkan dalam pelaksanaan program SDGs Desa, ini kan program baru juga mas.. pemerintah desa melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku menurut undang-undang. SDGs Desa pada tahun ini kan untuk kesejahteraan, ketahanan pangan, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat melalui program yang dicanangkan pemerintah.”¹¹⁷

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Saudara AS selaku Karang Taruna bahwasanya:

”Untuk perencanaan pembangunan desa selalu melewati musyawarah mas.. dari tingkatan RT tingkatan kepala dusun sampai desa. Semua terlibat sesuai tupoksi masing-masing dan program SDGs Desa ini sangat menyentuh kepada masyarakat.. yang jelaskan untuk ketahanan pangan. Jadi usulanya masyarakat berdasar pada SDGs Desa mas.. sebagai pedoman untuk menentukan pembangunan pada tahun 2021 ini. Dalam rapatpun semua usulan ditampung dan di verifikasi oleh tim verifikasi desa mas...”¹¹⁸

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Saudara SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

¹¹⁷ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

¹¹⁸ AS, Wawancara, Karang Taruna Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

”Begini mas.. jika semua tahapan desa sudah selesi untuk perencanaan pembangunan desa RKPDes ini di verifikasi oleh Bupati mas.. melalui Camat dan selesi di verifikasi dan di akir saya tandatangi bersama BPD dan dikeluarkan Perdes sebagai dasar pembangunan dimulai dan dilaksanakan. Seperti itu mas tahapanya dalam perencanaan mass.. dari awal sampai menjadi APBDes...”¹¹⁹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaanpembangunan desa dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Semua warga masyarakat merupakan pengawas dan pelaku pembangunan adalah pemerintah desa. Untuk pengelolaan keuangan desa di laksanakan oleh Kaur keuangan Desa atau yang disebut bendahara desa. Pembukuan pengelolaan keuangan desa dicatat dan dibukukan pada buku kas desa. Kepala Desa dan Bendahara mencairkan keuangan desa pada bank yang di tunjuk oleh Bupati/Wali Kota dengan rekomendasi oleh Camat sebagai pembina Pembangunan Desa. Hal ini diperkuat berdasarkan

¹¹⁹ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

wawancara Saudara SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

”Begini mas.. dalam pelaksanaan ini Kepala Urusan Perencanaan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan perangkungan APBDes. Dikerjakan bersama TPK di lapangan dan menginvetarisir kebutuhan dengan berdasar Rencana Anggaran Biaya. Jadi mereka di lapangan dikasih RAB mas.. dan mengambil barang sesuai dengan toko yang sudah menyepakati kerja sama dengan desa. Jadi dalam belanja mereka ini tidak sewena-wena mas.. semua memakai aturannya. Sesudah selesai kegiatan tersebut langsung menginventaris kebutuhan selama kegiatan berdasar RAB bersama Kepala Keuangan dan mengajukan pembayaran.”¹²⁰

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak MR selaku Kepala Perencanaan bahwasanya:

”Dalam Perencanaan ini mas.. saya sendiri langsung kordinasi dengan TPK masing-masing kegiatan dan kita lihat rangking pertama yang harus dikerjakan. Dan kegiatan ini saya kerjakan sesuai RAB dan sesuai toko sebagai pengadaan barang dan jasa yang sudah kerja sama dengan desa. Dan saya mengambil

¹²⁰ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

barang dan mengerjakan kegiatan tersebut. Sesudah selesai kegiatan saya kordinasi dengan sekretaris desa untuk membuat SPJ. SPJ saya diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuat SPP atau surat perintah pembayaran kepada Kepala Urusan Keuangan. Jika sudah selesai ganti kegiatan lainya lagi. Seperti itu mas...”¹²¹

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak SM selaku Sekretaris Desa bahwasanya:

”Jika sudah selesai kegiatan... Team Kegiatan itukan menyerahkan SPJ ke saya mas dan saya verifikasi apakah benar sudah selesai kegiatan tersebut. Jika belum saya suruh mencukupi dan jika sudah selesai saya mengajukan kepada Kepala Desa untuk pembayaran dan Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan mencairkan dari kas desa untuk pembayaran kegiatan.. jadi kegiatan di desa dikerjakan dulu dan sudah dikerjakan baru meminta pembayaran mas.. jadi modal dululah mas... baru minta pembayaran...”¹²²

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak TM selaku Kepala Keuangan Desa bahwasanya:

¹²¹ MR, Wawancara, Kepala Perencanaan Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

¹²² SM, Wawancara, Sekretaris Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

”Dalam Pencairan SPP atau surat perintah pembayaran jika sudah selesai kegiatan mas.. dicairkan perkegiatan. Saya mencairkan ke Bank Jatim bersama Kepala Desa. Sudah di cairkan saya berikan kepada team kegitan di saksikan sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk di berikan kepada toko pengadaan barang dan jasa atau dibayarkan kepada pekerja sesuai HOKnya mas..”¹²³

Dalam Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)desa harus membawa laporan dan perkembangan kegitan pembangunan. Batas waktu untuk pengajuan SPP dalam pengadaan barang dan jasa maksimal 10 hari kerja dan apabila melebihi batas waktu yang telah di tentukan maka harus di kembalikan pada bendahara desa dan dicatat pada buku kas desa.

Kasi dan Kaur Pelaksana kegiatan pembangunan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa dalam hal pembayaran pengadaan barang dan jasa

¹²³ TM, Wawancara, Kepala Keuangan Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

Pengajuan Surat Perintah Pembayaran harus dilampiri:

- a. Pernyataan pada pertanggungjawaban untuk belanja
- b. Bukti pada penerimaan barang atau jasa

Kewajiban Sekretaris Desa pada pengajuan SPP sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa meneliti keabsahan dokumen permintaan pada pembayaran sesuai realisasi anggaran
- b. Sekretaris Desa menguji keabsahan tagihan pada tagihan pembayaran yang diajukan
- c. Sekretaris Desa menguji dan melihat dana yang tersedia untuk pembayarankegiatan
- d. Jika permintaan pembayaran tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan maka Sekretaris Desa wajib untuk menolak permintaan pembayaran

Sekretaris Desa memverifikasi pembayaran yang diajukan oleh Kaur maupun Kasi pelaksana kegiatan pembangunan. Setelah dinyatakan lengkap maka ditindak lanjut oleh Kepala Desa bersama

Kaur Keuangan untuk dilaksanakan pencairan pembayaran sesuai SPP yang diajukan.

Kaur bersama Kasi pelaksana kegiatan pembangunan bertanggungjawab pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa maksimal 7 hari dari selesai kegiatan pembangunan.

3. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan Kaur Keuangan atau disebut bendahara. Bendahara desa mencatat semua pengeluaran ataupun penerimaan pada buku kas. Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Saudara SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

”Penatausahaan ini dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan mas... semua dicatat dan dibukukan disana. Semua tertib mas.. dari awal sampai akhir tahun. Selama satu tahun semua dicatat dan dan dibukukan. Ada buku pembantu bank, buku pembantu pajak”.¹²⁴

¹²⁴ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak TM selaku Kepala Urusan Keuangan Desa bahwasanya:

”Penatausahaan ini yang mengelola saya mas.. semua kegiatan dari awal sampai akhir selama satu tahun saya bukukan sebagai SPJ Kepala Desa diakhir tahun. Semua saya bukukan dari penerimaan pengeluaran dan lainnya yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan desa”.¹²⁵

Kaur Keuangan mencatat pada buku pembantu kas umum:

1) Buku bank umum

Pencatatan dari semua pengeluaran dan semua dari penerimaan dicatat melalui rekening kas desa.

2) Buku pajak

Pencatatan untuk setoran pajak dan penerimaan pada potongan pajak.

3) Buku panjar.

Pencatatan dari pertanggungjawaban dan pemberian terhadap uang panjar.

¹²⁵ TM, Wawancara, Kepala Keuangan Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

Pada penerimaan keuangan desa selanjutnya disetor padabuku rekening kas desa:

- 1) Penyetoran dilakukan secara langsung ke bank (Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
- 2) Penyetoran oleh pihak ketiga (bank lain, kantor pos)
- 3) Penyetoran dilakukan Kaur Keuangan jika penerimaan tersebut dari pihak ketiga.¹²⁶

4. Pelaporan

Kepala Desa wajib untuk memberikan pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai APBDes pada pada Bupati(semester pertama).

Pelaporan tersebut terdiri dari:

- 1) Pelaporan terhadap pelaksanaan (penggunaan) APBDesa
- 2) Pelaporan terhadaprealisasi pembangunan

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Bapak SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

”Dalam hal pelaporan ini mas.. saya menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes

¹²⁶ Ibid

melalui Camat yang saya laporkan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang sudah dikerjakan. Ini saya laporkan kepada Bupati melalui Camat. Semua saya susun saya laporkan diakhir bulan Juni. Semua perangkat satu bulan sebelum saya kirim laporan perangkat sayasuruh menyiapkan bahanya, jadi ya biasa mas kita semua lembur sampai malam di kantor desa. Kita kerjakan jangan sampai pelaporan terlambat. Biar kita semua ini ndak malu sama masyarakat jika pelaporan kepada Bupati ada keterlambatan.. Biasanya juga Camat juga menghimbau kepada Kepala Desa akir bulan Mei untuk persiapan pelaporan kepada Bupati”¹²⁷.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak SM selaku Sekretaris Desa bahwasanya:

”Wahhhh.. kalo pelaporan mas... kita di desa berharap sesuai tepat waktu mas... kita saling membantu bahkan malampun kita mengerjakan laporan mass.. yaa biasalah mas kadang ada yang absen tidak hadir.. tapi kalo tidak hadir biasanya mereka datang agak malam mas.. mungkin di lingkunganya ada hajatan warga atau apa lah.. semua kita kerjakan bersama sesuai tupoksi masing-masing kadang kita juga saling membantu kinerja perangkat lain jika kerjanya dirasa sudah selesai. Paling tidak

¹²⁷ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

kita satu minggu sebelum bulan juni untuk laporan semester pertama harus selesai. Jadi kita tidak nubyak-nubyaklah mas jika ada kekurangan dalam laporan”¹²⁸.

Kepala Desa membuat laporan dari realisasi APBDes maksimal pada bulan Juli minggu kedua. Selanjutnya Bupati melaporkan hasil kegiatan dari realisasi APBDes. Pelaporan kepada Menteri dengan melalui Dirjen (Direktur Jendral) Bina Pemerintahan Desa. Pelaporan tersebut maksimal bulan Agustus minggu kedua pada tahun anggaran berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun Kepala Desa memberikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes kepada Bupati. Laporan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban maksimal tiga bulan pada akhir tahun anggaran dan laporan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa.

Peraturan Desa (Perdes) tersebut disertai dengan:

¹²⁸ SM, Wawancara, Sekretaris Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

- 1) Laporan anggaran keuangan desa sebagai berikut:
 - a. Pelaporan terhadap anggaran realisasi pembangunan APB Desa.
 - b. Pelaporan dan pencatatan atas realisasi keuangan.
- 2) Pelaporan pada realisasi anggaran kegiatan pembangunan.
- 3) Pelaporan pada realisasi kegiatan pembangunan.
- 4) Program daerah atau lainnya yang diterima desa

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Saudara SR selaku Kepala Desa bahwasanya:

”Untuk pertanggungjawaban mas.. ada laporan realisasi APBDesa, ada laporan realisasi kegiatan, ada laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana jika ada mas.. sisa anggaran dan alamat pengaduan jika ada. Semua saya laporkan mas.. paling tidak bulan akhir Desember tahun anggaran mas... dikarenakan ada tenggangnya juga. Akhir Desember itu banyak kegiatan untuk kegiatan tahun berikutnya seperti mulai dari awal pembuatan perencanaan mass RKPDes dan APBDes... jadi saya dan perangkat desa

banyak yang lembur sampai malam diakir tahun. Tapi tak apalah karena inikan sudah tugas dan tanggungjawab. Hahaha..(sambil tertawa)”¹²⁹.

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara Saudara SM selaku Sekretaris Desa bahwasanya:

”Pertanggungjawaban ini kami kerjakan diakir tahun mass.. sebenarnya akir tahun ini banyak sekali tagihan laporan semua ngumpul diakir tahun dari banyak dinas dan lainnya mas.. kami kerjakan bersama temen perangkat sampai malam lembur karena kejar waktu dan target biar semua selesai.. mengejar selesainya laporan.. ada pelaporan anggaran realisasi APBDesa mas.. ada pelaporan realisasi pada kegiatan pembangunan mass.. ada pelaporan kegiatan pembangunan yang belum terealisasi jika ada mas.. dan juga pelaporan sisa anggaran serta alamat pengaduan masyarakat jika memang ada pengaduan dari masyarakat”¹³⁰.

Setiap pada akir tahun Kepala Desa wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari APBDes dan anggaran

¹²⁹ SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

¹³⁰ SM, Wawancara, Sekretaris Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

belanja desa. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Bupati melaporkan pertanggungjawaban kepada Menteri paling lambat bulan April minggu kedua tahun berjalan. Pelaporan tersebut melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pelaporan Realisasi APBDes dimuat media informasi guna diketahui oleh masyarakat desa.

Informasi tersebut memuat pada:

- 1) Laporan pada realisasi anggaran APBDesa
- 2) Laporan pada realisasi kegiatan anggaran desa
- 3) Kegiatan tidak terlaksana atau belum selesai dikerjakan
- 4) Sisa anggaran atau Silpa
- 5) Alamat untuk pengaduan masyarakat

C. Efektivitas Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Maksud program SDGs Desa dalam penelitian ini adalah SDGs Desa merupakan metode pembangunan

berkelanjutan. Dan merupakan program prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021.¹³¹ Sedangkan Dana Desa sudah diperjelas dalam Perpres yang dikeluarkan Presiden dengan Nomor 60 pada Tahun 2014. Yang isinya adalah dana yang ditransfer/bersumber dari APBNegara yang dimanfaatkan untuk desa. Dana tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Serta dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaran pemerintah desa meliputi pada pembangunan, pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu data yang penulis sajikan adalah data penggunaan Dana Desa pada program SDGs Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat ini lebih menekankan kepada aspek realiasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program SDGs Desa sangat erat hubungannya dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana hal tersebut merupakan faktor

¹³¹ A. Halim Iskandar, "Sosialisasi permendesa PD TT Nomor 13 Tentang Penggunaan Dana Desa 2021" (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2021): 12.

paling utama dalam keberhasilan program SDGs Desa di Desa Ngabar. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak SR selaku Kepala Desa mengenai pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Ngabar dalam wawancaranya bahwasannya:

”Pelaksanaan program SDGs Desa tetap mengacu pada pelaksanaan aturan yang ada pada program SDGs Desa tersebut. Agar kesejahteraan masyarakat desa ini lebih optimal dan baik. terhadap kesejahteraan masyarakat ini lebih menekankan kepada aspek realiasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ya... pelaksanaan program SDGs Desa sangat erat hubungannya dalam pengelolaan keuangan desa dimana hal tersebut kan merupakan faktor paling utama dalam keberhasilan program SDGs Desa Ngabar”.¹³²

Pelaksanaan program SDGs Desa dengan memanfaatkan dari penggunaan Dana Desa. Dikerjakan oleh pemerintah Desa Ngabar yang mengacu terhadap realisasi anggaran Dana Desa. Dana Desa bersumber dari APBN untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan, ekonomi terpenuhi, terbukanya lapangan

¹³² SR, Wawancara, Kepala Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

pekerjaan, desa bebas dari kemiskinan. Program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Realisasi program dalam upaya kesejahteraan masyarakat¹³³

No.	Program	Pendekatan Sumber	Pendekatan Proses	Pendekatan Sasaran
1.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	2.400.000	Peningkatan kapasitas Individu	Mempermudah Pengelolaan Administrasi
2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	15.100.000	Persiapan Untuk Perencanaan Pembangunan	Memperoleh usulan sesuai pembangunan Desa
3.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus,	3.500.000	Persiapan Untuk Perencanaan Pembangunan	Memperoleh usulan sesuai pembangunan Desa

¹³³ Dokumen laporan realisasi penyerapan dan output Dana Desa di Ngabar tahun 2021.

	Rembug			
4.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	61.785.000	Pelayanan kepada masyarakat	Keterbukaan Informasi Publik
5.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non/Formal	8.000.000	Honor tenaga pengajar/membuka lapangan pekerjaan	Mencerdaskan generasi bangsa pada pendidikan
6.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000	Sarana pembelajaran untuk anak	Mempermudah dalam pembelajaran dan menerima materi anak dalam belajar
7.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor	7.500.000	Tempat edukasi pembelajaran	Menumbuhkan masyarakat untuk minat baca dan belajar
8.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	42.850.000	Penyuluhan terhadap masyarakat	Memberikan tambahan gizi untuk generasi

	Bumil, Lansia			tumbuh cerdas
9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	164.349.000	Penyuluhan terhadap masyarakat	Masyarakat sehat bebas dari penyakit / Covid 19
10.	Pengasuhan Bersama pada Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000	Menyadarkan betapa pentingnya kecerdasan anak	Edukasi terhadap anak usia balita
11.	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	6.750.000	Penyuluhan terhadap kesehatan	Masyarakat tumbuh sehat untuk kesehatan keluarga
12.	Pembangunan/Re habilitasi/Peningk atan/Pengerasan Jembatan	139.673.800	Kebutuhan dasar untuk transportasi	Sarana Transportasi untuk mempermudah membawa hasil pertanian
	Pengelolaan	10.928.000	Kebutuhan	Sarana

13.	Lingkungan Hidup Milik Desa		dasar untuk transportasi	Transportasi untuk mempermudah membawa hasil pertanian
14.	Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000	Memperudahkan masyarakat menerima informasi pembangunan	Keterbukaan untuk pengelolaan kegiatan pembangunan
15.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	41.700.000	Sarana untuk pembelajaran Internet Desa	Memperudahkan masyarakat untuk mengakses Internet
16.	Pemeliharaan Transportasi Desa	2.080.000	Transportasi Desa	Transportasi milik Desa
17.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.500.000	Pertanian Desa	Peningkatan hasil pertanian masyarakat
	Bantuan Pertanian Dan Peternakan	136.000.000	Masyarakat Desa	Peningkatan usaha tani dan

18.				ketahanan pangan
19.	Meningkatkan Kapasitas Perangkat	18.000.000	Peningkatan kapasitas Individu	Mempermudah Pengelolaan Administrasi
20.	Sosialisasi Dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa	2.000.000	Peningkatan kapasitas Individu	Mempermudah Pengelolaan Administrasi
21.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000,	Peningkatan kapasitas Individu	Mempermudah Pengelolaan Administrasi
22.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	3.000.000	Peningkatan kapasitas Individu	Mempermudah Pengelolaan Adminstrasi
23.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.095.000	Desa Siaga Bencana	Pertolongan terhadap masyarakat untuk bencana
	Penanganan	216.000.000	Masyarakat	Ketahanan

24	Keadaan Mendesak		Desa	Pangan untuk bantuan.
----	------------------	--	------	-----------------------

Dari hasil tabel, bahwa program realisasi pembangunan pemerintah telah melaksanakan dan merealisasikan penggunaan anggaran tahun 2021. Pelaksanaan anggaran tersebut untuk kesejahteraan dan ketahanan pangan serta untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Penekanan pada penelitian terhadap anggaran pengelolaan keuangan desa dan berdasar pada prinsip atau arah pembangunan dan tujuan dari SDGs Desa. Program tersebut dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku serta akuntabel. Pada program tersebut bahwa Dana Desa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

Adapun prioritas pada Dana Desa tahun 2021 seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa/PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 adalah untuk pembangunan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan kearah desa tanpa kemiskinan serta desa tanpa kelaparan. Hal

tersebut telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak SM selaku Sekretaris Desa mengenai pelaksanaan SDGs Desa pada prioritas Dana Desa tahun 2021 di Desa Ngabar dalam wawancaranya bahwasannya:

“Pada dasarnya semua kegiatan program yang ada di Desa Ngabar itu menggunakan aturan yang berlaku dan dianjurkan dari pemerintah. Apalagi pada program terbaru ini program SDGs tidak terlepas pada prioritas penggunaan Dana Desa yang mengacu pada Permendes dan PDTT No. 13 Tahun 2020 adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kearah desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan dan semua itu untuk ketahanan pangan dipandemi Covid-19”.¹³⁴

Pada bidang ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kebutuhan dasar merupakan utama yang harus di selesaikan dimasa pandemi. Dimasa pandemi ini pemerintah desa mengalokasikan untuk bantuan langsung tunai, pencegahan covid-19 dengan membagikan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan edukasi untuk masyarakat bahaya covid-19 dan hidup sehat dimasa

¹³⁴ SM, Wawancara, Sekretaris Desa Ngabar Ponorogo, 20 Oktober 2021.

pandemi ini. Pemberian dan edukasi untuk ternak untuk masyarakat yang terputus dari tempat kerja atau terkena PHK. Sarana dan Prasarana untuk peningkatan atau pengerasan jalan yang bermanfaat untuk pertanian atau untuk kehidupan sehari-hari dalam transportasi. Kebutuhan utama untuk mengangkut pertanian menekan biaya pertanian dan sebagai perputaran ekonomi masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak NR, salah satu warga yang tergabung dalam anggota Gapoktan mengenai manfaat Program SDGs Desa dalam bidang pertanian.

“Program SDGs Desa memberikan manfaat yang besar terhadap kemajuan para petani. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan menuju pertanian yang semula jalannya rusak mengangkut hanya pakai sepeda motor sekarang bisa memakai mobil sehingga biaya lebih murah, bertambahnya pengetahuan para petani dalam bidang pertanian setelah adanya pelatihan dan penyuluhan, kemudahan para petani dalam mendapatkan pupuk yaitu setelah diadakannya pelatihan pembuatan pupuk mandiri sehingga tidak bergantung pada pupuk kimia yang semakin langka, kemudahan para petani dalam

mendapatkan sarana dan prasarana dan kemudahan-kemudahan lainnya”.¹³⁵

Hasil wawancara dari Bapak SN untuk manfaat pembangunan sebagai berikut.

“Melalui program SDGs Desa ini, kita sebagai petani merasa terbantu dengan dibangunnya sarana dan prasarana pertanian karena dengan sarana-sarana tersebut memudahkan dalam mendapatkan air irigasi untuk tanaman padi dan tanaman lainnya”.¹³⁶

Selanjutnya hasil dari wawancara Ibu NW manfaat SDGs Desa pada bidang kesehatan bahwasanya:

“Dengan program SDGs Desa, pelayanan kesehatan semakin baik karena sarana prasarana tercukupi, jalanya mudah dilalui sehingga jika ada ibu hamil yang mau melahirkan cepat sampai pada pos kesehatan desa dan jika berobat juga cepat sampai lokasi bidan. Dan juga mempermudah untuk membawa hasil panen masyarakat dan bisa diangkut oleh mobil jadi sekali angkut bisa membawa banyak hasil panen”.¹³⁷

¹³⁵ NR, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹³⁶ SN, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹³⁷ NW, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

D. Dampak Pelaksanaan Program SDGs Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan disini mengarah dimana kondisi seorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada kekurangan dan masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam kesehariannya. Dalam pelaksanaan program SDGs Desa Ngabar terhadap kesejahteraan masyarakat pasti ada dampak tertentu

Disini peneliti mendapatkan hasil file dokumentasi yang isinya adalah tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 8

Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan¹³⁸

Tingkat Kesejahteraan	Kepala Keluarga 2020	Kepala Keluarga 2021
Kurang Mampu	123	88
Prasejahtera	281	255
Sejahtera I	212	179
Sejahtera II	58	114
Sejahtera III	27	93
Sejahtera III Plus	15	52
JUMLAH	739	781

Dari data kesejahteraan di Desa Ngabar tersebut. Diperkuat bersama wawancara Bapak PJ warga masyarakat bahwasanya:

”Dampaknya semua pembangunan bisa dinikmati masyarakat sini, contohnya ya... pembangunan jalan usaha tani pembangunan irigasi untuk kesejahteraan masyarakat, pembuatan jembatan, pemeliharaan sarana prasarana, bantuan peternakan dan pertanian. Bantuan langsung tunai untuk warga miskin. Pemberdayaan peningkatan kapasitas masyarakat untuk perekonomian maupun ketahanan pangan.”¹³⁹

Diperkuat dengan hasil wawancara masyarakat penerima BLT yaitu Ibu SMY bahwasanya:

¹³⁸ Dokumen data Desa Ngabar Tahun 2021.

¹³⁹ PJ, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

”Saya sebelum mendapatkan bantuan BLT dimasa pandemi untuk keperluan bahan pokok susah karena tidak bisa bekerja harus dirumah mentaati peraturan pemerintah. Dan sekarang semenjak adanya bantuan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sampai sekarang dan sekarang sudah new normal sehingga saya bisa bekerja seperti sedia kala”.¹⁴⁰

Berikut hasil wawancara terkait dengan dampak program SDGs Desa Ngabar dengan ibu SM salah satu kader PKK:¹⁴¹

”Dampak program dalam kesejahteraan sangat bagus mas. Contohnya peningkatan pelayanan kesehatan, apalagi di era pandemi saat ini program kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini, selain itu yaitu juga kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan dan meningkatkan pendidikan PAUD/TK/TPA”.¹⁴²

Diperkuat dengan hasil wawancara Ibu ST terkait dengan dampak program SDGs Desa yang mengarah kepada kesejahteraan bahwasanya:

¹⁴⁰ SMY, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁴¹ SM, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

¹⁴² SM, Wawancara, Kader PKK Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

“Sangat bermanfaat untuk masyarakat di Ngabar sendiri, karena di dalam program SDGs Desa ini pemberdayaan untuk mensejahterakan dalam bidang pelayanan kesehatan khususnya masyarakat lansia dan masyarakat yang terdampak terkena Virus Covid-19 tidak terabaikan. Selain itu juga pendidikan PAUD yang dilaksanakan sangat efektif bagi penduduk disini tidak jauh-jauh menyekolahkan anaknya diusia dini, cukup dilingkungan saja. Selain itu juga kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDES Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan ada juga pelatihan kelompok masyarakat yang mana itu akan membekali masyarakat ke arah kesejahteraan dengan memberdayakan kelompok masyarakat yang aktif”.¹⁴³

Dari wawancara diatas diperkuat dengan hasil dokumentasi dari desa Ngabar yang dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel 9

¹⁴³ ST, Wawancara, Masyarakat Desa Ngabar Ponorogo, 22 Oktober 2021.

Daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat¹⁴⁴

No	Program Kegiatan	Sasaran/Manfaat
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	
2.	<u>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</u>	
	Sub Pada Bidang Pendidikan	
1.	Penyelenggaran sekolah Non-Formal (PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah)	Meningkatkan SDM Usia Dini
2.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Meningkatkan SDM Usia Dini
3.	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Meningkatkan SDM
	Sub Bidang Kesehatan	
1.	Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia)	Meningkatkan untuk Gizi Anak, Lansia dan Ibu Hamil.

¹⁴⁴ Dokumen laporan realisasi penyerapan dan output Dana Desa di Ngabar tahun 2021.

2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
3.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatkan SDM Usia Dini
4.	Lainnya (Sub Bidang Kesehatan)	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Sub Bidang Penataan Ruang Serta Pekerjaan Umum		
1.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jembatan	Meningkatkan hasil pertanian dengan menekas biaya angkut hasil pertanian
Sub Bidang Lingkungan Hidup (Kehutanan)		
2.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Meningkatkan hasil pertanian/ketahanan pangan
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	
4.	<u>BIDANG MASYARAKAT (PEMBERDAYAAN)</u>	
Sub Bidang (Pertanian dan Peternakan)		
1.	Pemeliharaan Irigasi Pertanian	Meningkatkan hasil pertanian/ketahanan

		pangan
2.	Bantuan Pertanian Dan Peternakan	Meningkatkan hasil pertanian/ketahanan pangan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Meningkatkan SDM Perangkat untuk mengelola Dana Desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
2.	Sosialisasi Dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa	Meningkatkan SDM Masyarakat dan usulan usulan yang bisa di anggarkan dari Dana Desa
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan SDM untuk pemberdayaan masyarakat /Kader

		Pemberdayaan
	Sub Bidang (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak)	
1.	Lain-lain (Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan)	Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat
	Sub Bidang (Dukungan Penanaman Modal)	
1.	Pelatihan Peningkatan usaha BUMDesa	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha/Ekonomi
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana Untuk Kesejahteraan Masyarakat
	Sub Bidang (Keadaan Mendesak)	
1.	Penanganan Keadaan Mendesak	Meningkatkan Ketahanan Pangan Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 dan mengentaskan Kemiskinan.

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SDGs DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA NGABAR PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dari data yang disajikan pada paparan bab 3, Pemerintah Desa Ngabar sebagai penyelenggara program SDGs Desa. Program SDGs Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk Menteri Desa. Hasil dari pelaksanaan program tersebut menuju pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:¹⁴⁵ Terfokus 2 poin sasaran terpenting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan.

Dari dua poin sasaran dan tujuan yang terpenting tersebut Desa Ngabar sudah melaksanakan kegiatan

¹⁴⁵ A. Halim Iskandar, “Sosialisasi permendesa PD TT Nomor 13 Tentang Penggunaan Dana Desa 2021” (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2021): 12.

program pembangunan sarana dan prasarana desa dengan melaksanakan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi pertanian, bantuan peternakan dan pertanian dan pemberdayaan orang miskin, pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi skala desa, bantuan langsung tunai (BLT) yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk orang miskin.

Pengelolaan pelaksanaan sesuai prosedur dan aturan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan harapan dari Kementerian Desa. Pengelolaan taat administratif serta transparan membuktikan bahwa pemerintah Desa Ngabar memiliki integritas yang tinggi. Tanggungjawab yang besar untuk pengelolaan anggaran untuk memberikan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan, lapangan pekerjaan terpenuhi serta kemudahan dalam sarana prasarana untuk masyarakat.

Semua itu tidak lepas dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusiaperangkat desa melalui program pemberdayaan perangkat desa, sehingga harapan dengan terwujudnya program SDGs Desa yang efektif dapat tercapai dalam rangka membangun negara Indonesia sesuai Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan*

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program SDGs Desa. Desa Ngabar melaksanakan program tersebut dengan memberikan pemberdayaan. Pemberian pemberdayaan oleh Pemerintah Desa dalam ketahanan pangan serta kesejahteraan menuju desa bebas kemiskinan sesuai dengan aturan undang-undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan pembangunan dan keuangan dilaksanakan melalui proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penatausahaan, proses pelaporan hingga proses pertanggungjawaban. Dengan pengelolaan keuangan tertib, pengelolaan dengan transparan serta pengelolaan yang akuntabel. Pengelolaan dibuktikan administrasi yang lengkap dan teratur dari dokumen yang ada. Mulai dari perencanaan musyawarah dusun, penggalan data usulan dari wilayah dusun, perangkan usulan, daftar hadir peserta musyawarah, tanggal batas waktu administrasi musyawarah yang menuju pada RKPDesa dan selanjutnya menjadi APBDes sebagai dasar pembangunan selama satu tahun anggaran. RPJMDes sebagai dasar utama

pembangunan desa selama enam tahun Kepala Desa menjabat. Pelaporan Pertanggungjawaban pemerintah serta hasil dari pembangunan (bukti fisik hasil dari realisasi pembangunan).

Selanjutnya, berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan program SDGs Desa yang tidak terlepas dari Dana Desa untuk kesejahteraan, ketahanan pangan masyarakat di Desa Ngabar dapat disimpulkan. Program pemerintah SDGs Desa dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah desa. Penilaian berdasar pada efektivitas oleh Sondong P. Sigian. Dimana pengukuran pada efektivitas antara lain sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Arah dan tujuan yang diinginkan(dicapai)

Pada tujuan dan arah pencapaian dalam program SDGs Desa untuk kesejahteraan masyarakat secara jelas tergambar pada Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas Dana Desa Tahun 2021 yang isinya mengarah pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sesuai dengan undang-undang desa tahun 2014 nomor 60 (Prioritas penggunaan Dana Desa

¹⁴⁶ M. Richard Steers, Efektivitas Organisasi, 9.

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa).

2. Strategi untuk mencapai

Pencapaian strategi SDGs Desa yang mengarah pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Tujuan pencapaian pada Dana Desa dijelaskan pada Undang-Undang Desa No. 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Pengelolaan Keuangan Desa), serta Permendes 13 Tahun 2020 (Prioritas Penggunaan Dana desa Berbasis SDGs Desa)

3. Proses terhadap analisis serta perumusan pada kebijakan

Dalam perumusan program yang strategis serta berkelanjutan pemerintah desa harus melaksanakan musyawarah atau bekerjasama pada stakeholder yang ada seperti semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, keterwakilan perempuan, keterwakilan dari manula, masyarakat kebutuhan khusus untuk merumuskan program sebagai dasar pembangunan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan. Tentunya kebijakan tersebut sesuai dengan

kebutuhan desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan serta proses yang matang tentunya akan mendapatkan hasil ataupun manfaat yang maksimal. Perencanaan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa di bawah kordinator Sekretaris Desa. Perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah desa yang diadakan dan ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa setelah mendapatkan evaluasi dari Bupati. Dengan proses tahapan perencanaan yang panjangmulai dari penggalian gagasan oleh lapisan masyarakat sampai pada tahapan evaluasi oleh Bupati tentunya akan mendapatkan hasil perencanaan matang sesuai harapan masyarakat desa.

5. Penyusunan program tepat sasaran

Penyusunan progam melibatkan semua lapisan masyarakat guna memperoleh data yang lengkap serta akurat. Dilaksanakan dengan musyawarah untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran serta

hasil dari pembangunan bisa dinikmati secara berkelanjutan.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Pemerintah pusat sudah menyediakan sarana maupun prasarana kerja sebagai pendukung utama melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa merencanakan sebaik-baiknya serta memanfaatkan sarana maupun prasarana yang sudah disediakan untuk tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun RKPDesa selanjutnya diperdeskan (Peraturan Desa) Kepala Desa bersama BPD menjadi APBDesa. APBDesa sebagai dasar pembangunan desa selama satu tahun anggaran.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Tertib pada administrasi merupakan langkah pelaksanaan yang efektif serta efisien. Desa Ngabar selalu mengarsipkan dokumen kerja desa sebagai tanggungjawab hasil dari kinerja.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian

Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh semua pihak. Pemerintah pusat membentuk

Pendamping Desa dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa untuk mengawal serta mengevaluasi penggunaan anggaran SDGs Desa.

B. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum pengertian dari efektivitas yaitu sejauh mana hasil atau manfaat yang bisa dicapai dan dirasakan masyarakat. Sebuah program disebut dengan efektif, apabila sasaran dalam tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai atau terwujud dengan baik. Efektivitas terhadap penelitian ini tercapainya sebuah tujuan dari program SDGs Desa yang telah dilakukan pemerintah Desa Ngabar dengan melihat hasil (*output*) yang bisa dirasakan manfaatnya untuk kehidupan masyarakat.

Menurut dari Martini Lubis bahwa terdapat 3 cara pendekatan pengukuran tingkat efektivitas tersebut. Tiga cara pendekatan pengukuran yang pertama pendekatan terhadap sumber (*resource approach*), yang kedua

pendekatan terhadap proses (*process approach*), dan yang ketiga pendekatan terhadap sasaran (*goals approach*).¹⁴⁷

Berdasarkan dari hasil analisis data lapangan dengan teori diatas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program SDGs Desa di Ngabar terbagi menjadi 3 tingkat efektivitas yaitu:

1. Pendekatan terhadap sumber(*resource approach*)

Pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, tercapainya sasaran serta tujuan. Pendekatan sumber diutamakan memperoleh hasil dari fisik atau non fisik sesuai dengan sarasanya.

Pemerintah telah menyediakan sumber non fisik dari tersedianya anggaran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBNegara. Pemerintah Desa menyiapkan perencanaan anggaran pembangunan selama satu tahun yang disebut APBDesa yang digunakan dalam pengajuan pencairan anggaran dari APBNegara. Dari penyaluran APBNegara ke desa dengan dasar APBDesa yang dilaksanakan dalam

¹⁴⁷ Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

kegiatan program pembangunan ini yang disebut sumber daya.

Pembangunan secara swakelola di Desa Ngabar yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan aturan merupakan pendekatan sumber berupa fisik. Dari pemaparan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan SDGS Desa menggunakan pendekatan sumber (*resource approach*) Desa Ngabar sudah efektif.

2. Pendekatan terhadap proses (*process approach*)

Mekanisme kegiatan internal organisasi merupakan pendekatan proses (*process approach*). Pada pendekatan proses mengidentifikasi seluruh dari kegiatan internal serta mekanismenya sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah Desa Ngabar melaksanakan kegiatan program sesuai dengan aturan undang-undang. Pelaksanaan dengan matang dan melibatkan semua stakeholder yang ada dengan harapan menghasilkan pembangunan sesuai arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan, tahapan

pertanggungjawaban dilaksanakan dengan tertib administrasi. Dengan pelaksanaan program yang tertib administrasi bahwa Desa Ngabar merupakan desa yang menggunakan dengan pelaksanaan keefektifan proses pembangunan.

3. Pendekatan terhadap sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran merupakan hasil (*output*) dari realisasi kegiatan yang ingin dicapai. Pusat perhatian dalam pendekatan ini adalah *output* dari realisasi kegiatan yang ingin tercapai dan dapat dirasakan manfaatnya.

Pendekatan sasaran untuk hasil dari pelaksanaan program SDGs Desa dengan melihat realisasi yang sudah dilaksanakan. Realisasi kegiatan pelaksanaan program SDGs Desa yang ada di Desa Ngabar dilaksanakan dengan efektif. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 sarana prasarana transportasi jalan, kesehatan masyarakat, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan. Realisasi pelaksanaan program di Desa Ngabar sesuai dengan program SDGS Desa. Semua program tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta

berkelanjutan. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil dari wawancara dengan beberapa warga masyarakat tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program SDGs Desa.

C. Analisis Dampak Pelaksanaan Program SDGs Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum memberikan kemampuan serta kemandirian kepada masyarakat dengan terpenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan konsep dari kesejahteraan masyarakat. Memberikan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dengan prinsip usaha mandiri masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan ketahanan pangan, sehingga akan mampu terpenuhi kebutuhan sendiri. Program pemerintah dengan diluncurkannya SDGs Desa diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, hidup mandiri, aman, nyaman, terpenuhi kebutuhan, lingkungan bebas dari pencemaran atau polusi serta terjamin hak dan kewajiban masyarakat.

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang berkonsep pada kesejahteraan Islam. Pada karya Al-Ghazali termaktup konsep kemslahatan umat serta kesejahteraan bersama. Dalam pemikiran Al-Ghazali untuk kesejahteraan umat terdapat lima tujuan dasar yang harus diperhatikan yang pertama pada dasar agama, yang kedua pada jiwa, yang ketiga pada keturunan, yang keempat pada harta benda dan yang kelima pada akal nya.¹⁴⁸

Pada pandangan Islam, masyarakat sejahtera apabila terpenuhi dari dua kriteria:

- a. Terpenuhi atau tersedianya kebutuhan pokok pada setiap individu umat; diantaranya pangan, ada sandang, ada papan, ada pendidikan, ada kesehatan.
- b. Terjaganya maupun terlindungi pada agama, pada harta, pada jiwa, pada akal, dan pada kehormatan umat.¹⁴⁹

Berdasar pada hasil analisis data lapangan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan. Dampak positif tersebut terlihat dalam daftar realisasi bidang ketahanan

¹⁴⁸Al-Ghazali, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017). Cet.4.

¹⁴⁹M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.

pangan, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, terpenuhi pendidikan, pengentasan kemiskinan, sarana jalan transportasi untuk kegiatan serta program-program yang sudah dilaksanakan di Desa Ngabar. Sasaran utama dalam program ini yang utama terhadap kehidupan yaitu pada masyarakat bebas dari kemiskinan dan masyarakat bebas dari kelaparan. Masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan rasa aman dan nyaman dala berinteraksi soaial.

Pokok utama dalam kehidupan merupakan kebutuhan pangan tercukupi dan sudah sepantasnya program pemerintah untuk terus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan dari segi lahan pertanian tersedianya lapangan pekerjaan, kemudahan dalam akses kebutuhan sosial pelayanan publik. Program Pokok SDGs Desa menekan angka kemiskinan dengan harapan bahwa tahun 2030 masyarakat bebas dari kemiskinan dan kelaparan dengan adanya program tersebut. Berdasarkan tingkat kesejahteraan dari tahun 2020 dan tahun 2021 bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 10

**Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan
Tahun 2020 dan Tahun 2021¹⁵⁰**

Tingkat Kesejahteraan	Kepala Keluarga 2020	Kepala Keluarga 2021
Kurang Mampu	123	88
Prasejahtera	281	255
Sejahtera I	212	179
Sejahtera II	58	114
Sejahtera III	27	93
Sejahtera III Plus	15	52
JUMLAH	739	781

Pemerintah Desa dalam hal Program SDGs Desa ini sangat terbantu karena sebagai dasar pembangunan dan arah kebijakan yang strategis untuk membangun desa memeberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Desa merupakan potret dari Bangsa dimana Desa akan terpenuhi

¹⁵⁰ Dokumen data Desa Ngabar Tahun 2021.

kebutuhan kehidupan, hidup yang nyaman, aman, terpenuhi dari betuhan hak serta keawajiban, maka negara akan menjadi maju dan sukses dalam pembangunan atau visi misi dari Kepala Negara. Dengan program pengentasan kemiskinan dan desa tanpa kelaparan merupakan langkah yang tepat untuk masyarakat di tengah terhimpitnya ekonomi dari pandemi Covid-19.

Program SDGs Desa memberikan dampak positif untuk masyarakat, karena mulai dari anak yang masih dalam kandungan sampai meninggal mendapatkan perhatian yang khusus. Dari kegiatan Posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, pendidikan anak usia dini seta pendidikan keluarga kurang mampu, serta lansia semua terurus terhadap pos anggaran pemerintah. Untuk ketahanan pangan terdapat BumDes sebagai pelopor penggerak ekonomi desa dengan tidak menindas usaha masyarakat yang ada. Pengolahan lahan pertanian dengan irigasi yang cukup, pembenahan saluran air untuk irigasi, pemanfaatan lingkungan sekitar dengan penanaman hidroponik, pembuatan pupuk organik yang tidak bertumpu pada pupuk subsidi pemerintah.

Kebutuhan akan sosial terpenuhi dari kesehatan, layanan publik terhadap informasi yang ada, akses jalan yang mudah untuk transportasi, pelatihan dan juga pemberdayaan masyarakat kelompok yang kurang mampu terhadap kebutuhan sehari-hari. Sehingga semua itu memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat. Diperkuat lagi dengan hasil jawaban wawancara para warga masyarakat bahwa warga masyarakat sudah menikmati dan merasakan hasil dari program SDGs Desa serta merasa senang dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan warga dimasa pandemi.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program SDGs Desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ngabar telah melaksanakan program SDGs Desa sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, berdaya serta kebutuhan ekonomi terpenuhi. Pelaksanaan realisasi pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 (Prioritas Penggunaan Dana Desa). Pengelolaan dan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Pengelolaan Keuangan Desa). Proses pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan matang yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, tahapan pelaporan hingga tahapan pertanggungjawaban dengan tertib administrasi serta

transparan dan akuntabel. Administrasi serta dokumen lengkap membuktikan bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Ngabar adalah efektif. Administrasi mulai dari RPJMDes penjabaran visi dan misi Kepala Desa sebagai dasar pembangunan selama enam tahun, APBDesa merupakan peraturan desa untuk pembangunan satu tahun anggaran, RKPDesa merupakan penyusunan kegiatan pembangunan Desa, bukti fisik hasil dari kegiatan pembangunan, pelaporan penyelenggaraan serta laporan realisasi anggaran desa.

2. Efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar Ponorogo cukup efektif. Dengan tingkat pengukuran efektivitas yang meliputi:
 - a) Pendekatan sumber, merupakan pendekatan dengan pemberdayaan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, baik non fisik maupun fisik;
 - b) Pendekatan proses, pelaksanaan program SDGS Desa dilaksanakan sesuai aturan undang-undang. Pengelolaan keuangan administrasi yang tertib serta transparan. Semua itu menunjukkan bahwa program SDGs Desa dikelola secara efektif;
 - c) Pendekatan sasaran, dimana pendekatan tersebut menunjukkan bahwa semua program mendapatkan hasil sesuai

dengan rencana dan tujuannya sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal.

3. Dampak SDGs Desa terhadap kesejahteraan di Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo telah memberikan dampak yang positif. Dampak tersebut terlihat dalam daftar realisasi pada pembangunan desa, pemberdayaan terhadap masyarakat, penanggulangan terhadap darurat bencana dan penanganan keadaan mendesak serta program yang sudah dilaksanakan di Desa Ngabar. Hal ini sudah memberikan dampak positif terhadap pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi pertanian, pemberian bibit ternak dan pertanian, pemberian bantuan langsung tunai, pemberdayaan masyarakat atau lembaga desa, kesehatan masyarakat, posyandu, operasional pendidikan non formal, usaha bumdes, paralegal, profil desa, peta desa serta pelaksanaan yang mengarah pada sasaran dan manfaat yang tepat pada kesejahteraan masyarakat. Dan diperkuat lagi dengan hasil jawaban wawancara para warga masyarakat Ngabar bahwa warga masyarakat sudah menikmati dan merasakan hasil dari program SDGs Desa Ngabar

serta merasa senang dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan warga Ngabar.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini:

1. Bagi IAIN Ponorogo, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Efektivitas Program SDGs Desa dan diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah.
2. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, saran dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program kedepan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta program pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dinikmati oleh anak cucu generasi mendatang.
3. Bagi peneliti, kedepannya diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di desa Ngabar

Ponorogo, akan tetapi diluar desa Ngabar sebagai sampel dalam penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers ,2017).
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: tp, 2015).
- Chamid, Nur, *Jejak langkah sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang* (Jakarta: LP3S, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2006), QS. Ar-Ra'd
- Fuad Chalil, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Erlangga, 2009)
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Ika, Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2014)
- Halim, Abdul Iskandar, “*Peraturan Menteri Desa no. 13 tahun 2020*“ (Jakarta: tp, 2015).

- Halim, Abdul Iskandar, *Sosialisasi Permendesda PDTT Nomor 13 Tentang Penggunaan Dana Desa 2021* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).
- Halim, Abdul Iskandar, “*hikmah terbesar pandemi global covid 19*“ <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id>, (5 Januari 2021)
- Halim, Abdul Iskandar., *Inilah Prioritas Penggunaan dana Desa 2021*, <https://setkab.go.id/inilahh-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021/>
- Halim, Abdul Iskandar, “Desa tanpa Kemiskinan dan Kelaparan,” diakses pada 4 Januari 2020 pukul 08.17 WIB. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3359/gus-menteri-desa-tanpa-kemiskinan-dan-desa-tanpa-kelaparan-adalah-target-kita>,
- Halim, Abdul Iskandar, “Prioritas Penggunaan Dana Desa,” diakses pada 31 Januari 2020 pukul 20.34 WIB. <http://sdgsdesa.kemendesa.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf>,
- Halim, Abdul Iskandar, “Metodologi Pengukuran SDGs Desa,” diakses pada 5 Januari 2020, pukul 10.20 WIB <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3548/gus-menteri-rilis-metodologi-pengukuran-sdgs-desa>,
- Hari Lubis dan Martani Husaini, “*Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*”, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987)

- Hasan, Muhammad, Azis, Muhammad, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013).
- Hoelman, Michael, *“Panduan SDGS Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemengku Kepentingan Daerah”* (Jakarta selatan : Infid, 2015)
- Hornby., *Oxford Advanced Learner’s Dictionary Third Edition. Newyork: Oxford University Press.*(2000)
- Jusuf, Gellwynn *“Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)”* (Jakarta Selatan : Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas, 2017)
- KementerianKeuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*(Jakarta: t.p., 2017).
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia *Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 13 Tahun 2021*(Jakarta: 2021).

- Kurniawan, Agung. *Transformasi pelayanan publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005).
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).
- Mannan, M. Abd., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 19.
- Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*(Bandung: RemajaRosda Karya, 2003).
- Marthon, DR. Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007)
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (2018)
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000).
- Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar kesejahteraan sosial* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Jakarta: 2018)
- Priyono, Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008).
- Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021 (2022)

- Raharjo, Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta, 2011: Graha Ilmu)
- Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan* (Bandung: UNPAD Press, 2016).
- Rany, An Nisaa Syabrina, “*Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017*”, *Unair Repository* (2018)
- Ridhwani, Iwan “*Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”, (Tesis, Pascasarjana Iain Ponorogo, 2020)
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010)
- Rukminto Adi, Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002).
- Santosa, Djonet, “*Panduan Bagi Masyarakat Sipil Dalam Monitoring Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Di Daerah*” (Jakarta Selatan : Infid, 2019)
- Sedarmayanti, “*Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil*”, (Bandung: Aditama, 2009)

Siskeudes, Dokumen laporan realisasi penyerapan dan output Dana Desa di Ngabar tahun 2021.(2022)

Sondang P. Siagian, “*Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Sondang P. Siagian, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Steers, M. Richard, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Supriyono, “*Sistem Pengendalian Manajemen*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)

Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 79 Selodang Mayang (2019)

Tujuan dan sasaran ketahanan pangan,” diakses pada pukul 09.20 WIB 4 Januari 2020. [\(http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/68-SDGs-Desa-Pengertian--Tujuan-dan-Sasaran#:~:text=Jika%20mengutip%20dari%20situs%20undp,mempromosikan%20pertanian%20berkelanjutan%20\(Zero%20Hunger\)](http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/68-SDGs-Desa-Pengertian--Tujuan-dan-Sasaran#:~:text=Jika%20mengutip%20dari%20situs%20undp,mempromosikan%20pertanian%20berkelanjutan%20(Zero%20Hunger))) (Desa Sarimekar Buleleng: 2020)

Undang-undang, “*Kesejahteraan Sosial* “ No 11 Tahun 2009. <http://peraturan.bpk.go.id>, (26 Maret 2021)

Widiastuti, Siti Kurnia, Dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015)

Yulianto, Totok, *“Pedoman Proses Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”* (Jakarta Selatan : Indonesia Untuk Kemanusiaan, 2019)

Sumber Jurnal dan Penelitian:

Amirus, Sodiq. 2015. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”.
Jurnal STAIN Kudus, 3 (2).

Christanto, Bram. 2015. “Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”.
Jurnal Ilmiah Untag Semarang, 4 (3).

Dzaki Ansori, Mochamad, “*Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah ahasiswa*

Nurhayati dan Darwansyah. 2013. “Peran Struktur Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja”. *Jurnal Ekobis*, 14 (2), 4.

Mannan, M. Abd., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*
(Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997)

Mangkunegara, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*”, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003)

Mediana, Desy Handayani, “*Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri*”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa*, Universitas Brawijaya Malang (2019)

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama “*Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*”, (Karya Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

Rosni. 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. *Jurnal Geografi*, 9 (1).

Wijayanti dan Ihsannudin. 2013. “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”. *Jurnal Agroekonomika*, 2 (2).

Zulfhi Surya, Roberta, *Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Desa Seresam di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu*” ISSN: 2620-3332, *Jurnal Bapeda SDGs Center*, Universitas Islam Indragiri,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Asis Sustiawan lahir di Ponorogo pada tanggal 28 April 1986, putra ke-dua dari bapak Yatemo dan ibu Lasemi. Pendidikan formal yang ditempuh yakni SDN 2 Desa Muneng Kecamatan Balong lulus tahun 2000, kemudian di SMPN 1 Balong Kecamatan Balong lulus tahun 2003.

Setelah lulus dari SMPN 1 Balong Penulis membantu ekonomi keluarga (1 tahun) dengan bekerja serabutan yang utama sebagai penggembala kambing, pada tahun 2004 Penulis melanjutkan di SMAN 1 Slahung Kecamatan Slahung lulus tahun 2007. Setelah lulus dari SMAN 1 Slahung Kecamatan Slahung Ponorogo kemudian Penulis melanjutkan di Wearnes Education Center (D1) lulus tahun 2018. Setelah dari Wearnes (D1 Informatika) Penulis melanjutkan pendidikan di STAI Madiun dengan jurusan tarbiyah PAI (S1) lulus tahun 2012 dan pada saat mengenyang pendidikan S1 di STAI Madiun (2010 semester 4) Penulis menempuh pendidikan di Akademi

Koperasi Tantular Madiun dengan jurusan Management Keuangan (D3) dan lulus tahun 2013. Setelah itu tahun 2020 penulis melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya, yakni Pascasarjana (S2) prodi Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo. Pengalaman Bekerja Penulis adalah (1) menjadi guru Pramuka di SDN Wayut Kecamatan Jiwan Madiun; (2) BUMN PT. Sucofindo 2012-2017 di Pasar Minggu Jakarta Selatan; (3) BUMN PT. Surveyor Indonesia tahun 2014 ditempatkan di Kota Bogor; (3) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tahun 2017-sekarang dan ditempatkan di Kecamatan Sukorejo Ponorogo pada tahun 2017, di Kecamatan Kauman Ponorogo tahun 2018 – 2019, di Kecamatan Slahung Ponorogo tahun 2020, selanjutnya ditempatkan di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tahun 2021 dan sekarang tahun 2022 ditempatkan di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.